

MEMUPUK KEMANDIRIAN DENGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
(Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al-Bayan, Majenang
Kabupaten Cilacap)

Laporan Penelitian



Oleh:
Asyhabuddin, M.A.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015

PENGESAHAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan penelitian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Memupuk Kemandirian Dengan Kewirausahaan Sosial (Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al-Bayan, Majenang Kab. Cilacap)

Jenis Penelitian : Individual

Peneliti : Asyhabuddin, S.Ag., S.S. M.A.

NIP : 197502062001121 001

Pangkat/Golongan : Lektor/III C

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Bidang Ilmu : Pengembangan Masyarakat Islam

Sumber Anggaran : DIPA STAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2015

Biaya : 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Demikian Pengesahan ini dibuat agar dapat dijadikan periksa adanya.

IAIN PURWOKERTO
Peneliti a.n Purwokerto, 9 Oktober 2015
Ketua LPPM IAIN Purwokerto

Asyhabuddin, S.Ag., S.S. M.A.
19750206 200112 1 001

Sony Susandra, M.Ag
NIP. 197204291999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Asyhabuddin, S.Ag., S.S., M.A.

NIP : 197502062001121001

Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “Memupuk Kemandirian Dengan Kewirausahaan Sosial (Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al-Bayan, Majenang Kab. Cilacap)” adalah karya asli kami dan tidak mendapatkan bantuan dana penelitian dari sumber lain.

Demikian pernyataan ini kami buat. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya tidak jujur terkait pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan.

Purwokerto, 9 Oktober 2015

Pembuat pernyataan

IAIN PURWOKERTO

Asyhabuddin, S.Ag., S.S., M.A.

KATA PENGANTAR

Pendidikan dan dakwah adalah dua entitas yang menjadi *core business* bagi pesantren. Satu hal penting dalam pelaksanaan kedua hal tersebut adalah kesinambungannya. Demi untuk menjaga kesinambungan tersebut, pesantren membutuhkan kemampuan pendanaan yang cukup besar. Membebankan biaya kepada santri dan para dermawan merupakan langkah yang mudah tetapi kurang “cerdas”. Pesantren seharusnya mampu mandiri untuk membiayai pelaksanaan *core business*-nya tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kasus pesantren yang mampu melaksanakan kewirausahaan sosial sebagai bagian dari aktivitas keseharian para santri dan pengelola pesantren demi menuju kemandirian dan agar mampu memandirikan masyarakat di sekitarnya.

Terima kasih tak terhingga peneliti sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini: Bpk. Amat Nuri, Bpk. Sony Susandra dan seluruh staf LPPM IAIN Purwokerto; Bpk. KH. Fathul Amin Aziz, KH. Mahsun Yusuf Najmudin, Ajid Anwarudin serta seluruh anggota dewan pengasuh dan pengurus pesantren El-Bayan, Majenang atas izin penelitian dan kesediaan diwawancarai serta memberikan dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini serta mengantarkan peneliti melihat lokasi dan kegiatan unit-unit usaha yang ada; terakhir, ucapan terima kasih diucapkan kepada Bapak Ahmad Rifa'i (Ari) atas kesediannya mengantarkan peneliti dari Purwokerto ke Majenang serta menjadi “pintu masuk” bagi peneliti ke pondok pesantren El-Bayan.

Terakhir, semoga penelitian yang sangat sederhana dan sangat banyak kekurangannya ini bermanfaat untuk pembaca.

Terima kasih.

ABSTRAK

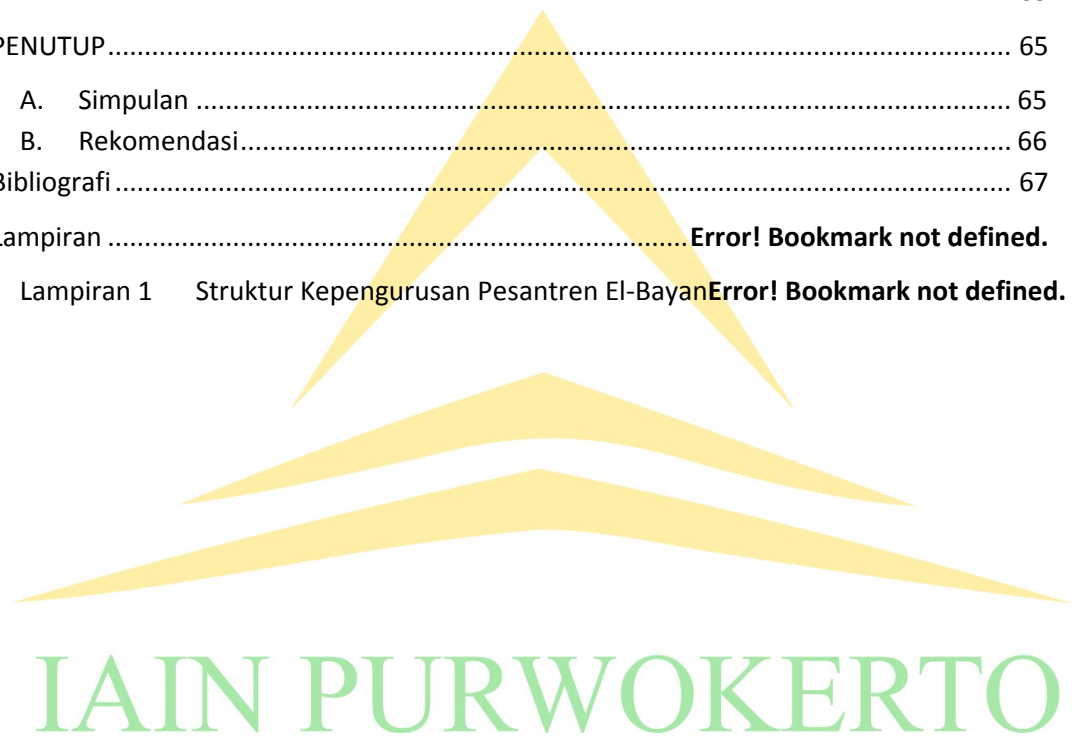
Dalam konteks core business-nya, pesantren berdiri sebagai upaya para cerdik pandai di bidang keagamaan Islam (ulama) untuk tafaqquh fi al-din, yakni upaya penanaman nilai-nilai keagamaan Islam kepada para penuntut ilmu di pesantren (santri) dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa selain menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik para santrinya (internal), pesantren di Indonesia, melalui para kiai dan santri-santri seniornya, merupakan lembaga dakwah, yakni lembaga yang memerankan diri dalam penyebaran atau pemasyarakatan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat sekitar pesantren (eksternal). Satu persoalan penting yang selalu menjadi sorotan dalam upaya perjuangan pesantren untuk melaksanakan misi gandanya, pendidikan dan dakwah pengembangan masyarakat, adalah tentang kesinambungan; seberapa mampu pesantren-pesantren pelaksana model-model dakwah pengembangan masyarakat di Indonesia melaksanakan dakwah mereka secara berkesinambungan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pesantren El-Bayan menggunakan strategi kewirausahaan sosial sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan tersebut.

Dari hasil penelitian didapati bahwa Kewirausahaan Sosial yang dibangun di pesantren El-Bayan merupakan kelanjutan secara tidak disengaja dari pemberian bekal kewirausahaan untuk para santri yang dilakukan oleh pesantren El-Bayan. Pesantren El-Bayan memiliki berbagai unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai Kewirausahaan Sosial karena memenuhi empat unsur kewirausahaan sosial, yaitu Misi Sosial, Masyarakat Sipil (sebagai inisiator dan partisipan), inovasi dan kegiatan ekonomi. Model usaha yang dianut termasuk dalam kategori Social Business Ventures, di mana Pesantren El-Bayan membangun unit-unit usaha untuk mendapatkan laba, dengan menggunakan dana investor yang tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi lebih demi untuk berjalannya berbagai misi sosial yang dimiliki oleh pesantren El-Bayan. Kegiatan kewirausahaan sosial ini memberikan dampak sosial, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada masyarakat pesantren sendiri (internal) maupun kepada masyarakat di luar pesantren (eksternal). Kewirausahaan sosial (atau pelatihan kewirausahaan) ini diberikan karena keprihatinan pengelola pesantren atas tidak diakuinya kompetensi lulusan pesantren untuk memangku pekerjaan atau jabatan. Selain itu, sebuah hadits yang mengatakan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain” menjadi pendorong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	9
1. Jenis dan Metode Penelitian.....	9
2. Obyek dan subyek penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
F. Sistematika Laporan.....	12
BAB II.....	13
KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
A. Pesantren.....	13
B. Pengembangan Masyarakat.....	30
C. Kewirausahaan Sosial	41
BAB III	45
PESANTREN ELBAYAN	45
A. Aspek Geografis.....	45
B. Sejarah Singkat	46
C. Program Pendidikan dan Dakwah.....	47
1. Pendidikan.....	47
2. Dakwah Kemasyarakatan/Pengembangan Masyarakat	52

BAB IV	54
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI PESANTREN ELBAYAN.....	54
A. Kewirausahaan Sosial Pesantren El-Bayan.....	54
B. Dampak Kewirausahaan Bagi Pelaksanaan misi sosial Pesantren El-Bayan.....	61
1.Dampak Internal (Pendidikan)	61
2.Dampak Eksternal (Dakwah Kemasyarakatan)	62
C. Dasar Pemikiran (Keagamaan) Kewirausahaan Sosial Pesantren Elbayan	63
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Rekomendasi.....	66
Bibliografi.....	67
Lampiran	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1 Struktur Kepengurusan Pesantren El-Bayan.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks *core business*-nya, pesantren¹ berdiri sebagai upaya para cerdik pandai di bidang keagamaan Islam (ulama) untuk *tafaqquh fi al-din*, yakni upaya penanaman nilai-nilai keagamaan Islam kepada para penuntut ilmu di pesantren (santri) dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa selain menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik para santrinya (internal), pesantren di Indonesia, melalui para kiai dan santri-santri seniornya, merupakan lembaga dakwah,² yakni lembaga yang memerankan diri dalam penyebaran atau pemasyarakatan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat sekitar pesantren (eksternal).

Dalam pelaksanaan dakwahnya, pesantren menganut salah satu atau gabungan dari tiga model dakwah. Model dakwah yang secara tradisional dianut oleh kalangan pesantren sejak awalnya adalah pemberian nasehat atau penjelasan mengenai ajaran-ajaran keagamaan dengan menggunakan kata-kata atau biasa dikenal sebagai dakwah bil lisan atau bil mauidhah hasanah. Tradisi dakwah dengan menggunakan lisan ini dilakukan secara turun-menurun oleh para kiai

¹ Istilah pesantren yang digunakan di sini dibatasi pada pengertian pesantren tradisional atau yang sering disebut sebagai pesantren *salaf*, yakni pesantren-pesantren yang mengidentifikasi diri sebagai penganut paham ahli sunah wal jama'ah dan anggota organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

² M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), 1994), hlm. 97. Lihat juga Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan" dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (ed.). *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar Internasional "the Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1988), hlm. 91.

dan penerusnya melalui forum-forum pengajian baik dalam skala kecil maupun besar.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, beberapa pihak dari kalangan pesantren mulai merasa tidak memadainya pelaksanaan dakwah hanya secara lisan. Menurut mereka, masyarakat tidak hanya membutuhkan kesejahteraan spiritual, yang dapat dipuaskan dengan petuah-petuah agama, belaka. Masyarakat, terutama yang hidup di pedesaan dan didera oleh kemiskinan, juga membutuhkan kesejahteraan secara ekonomi, karena kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek pendukung kekhusyukan dan ketenangan mereka dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Oleh karena itu, orientasi dakwah haruslah dirubah dari yang sekedar menyebarkan nilai-nilai spiritual ke arah pemberdayaan masyarakat secara komprehensif yang juga meliputi kesejahteraan secara ekonomi disamping, tentu saja kesejahteraan spiritual. Ini sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu membawa masyarakat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat³.

Perubahan orientasi dakwah tersebut juga membawa perubahan dalam metode yang digunakan. Orientasi dakwah untuk pemberdayaan masyarakat haruslah dilaksanakan bukan sekedar secara oral, atau *bi al-lisan*, tetapi haruslah dilakukan secara tindakan, atau *bi al-hal*, yaitu pelaksanaan dakwah yang dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata dengan terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan diri secara sosial dan ekonomi. Aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren dalam hal ini diartikan sebagai pelaksanaan dakwah *bi al-hal* tersebut.

Dalam kerangka *da'wah bi al-hal* semacam itulah, lembaga-lembaga pengembangan masyarakat bermunculan di sejumlah pesantren di Indonesia

³ Lihat catatan kaki mengenai definisi da'wah di atas. Untuk informasi lebih dalam, lihat MA Sahal Mahfudh (1994: 97-106).

sejak akhir 1970an seperti Biro Pengembangan Masyarakat (BPM) di pesantren an-Nuqayah, Guluk-guluk, Madura; Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) di pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah; dan Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) di pesantren Cipasung.⁴

Model dakwah ketiga adalah dakwah *bi al-mujadalah*, yakni dakwah yang menggunakan strategi perumusan “pemikiran/konsep alternatif” guna untuk membantah, meluruskan atau memberikan usulan alternatif terhadap pemikiran/konsep “resmi” yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang yang dipandang akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Model dakwah ini menggunakan strategi *social action*. Salah satu contoh lembaga yang melaksanakan model dakwah semacam ini adalah Forum Silaturahmi Petani dan Pesantren (FSPP) di Yogyakarta, yang pada tahun 2004 melakukan upaya korektif terhadap kebijakan pemerintah tentang pembelian tanah untuk digunakan untuk kepentingan umum.

Dalam dakwah *bi al-mujadalah*-nya, FSPP melakukan serangkaian *action*, di antaranya perumusan argumen tentang “pembelian tanah untuk kepentingan umum” dalam perspektif hukum Islam dan upaya *lobbying* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa lembaga terkait.

Satu persoalan penting yang selalu menjadi sorotan dalam upaya perjuangan pesantren untuk melaksanakan misi gandanya, pendidikan dan dakwah pengembangan masyarakat, sebagaimana model-model dakwah yang dilakukan oleh pesantren, terutama model dakwah *bi al-hal* dan dakwah *bi al-mujadalah*, adalah tentang kesinambungan; seberapa mampu pesantren-pesantren

⁴ Lihat Ison Basyuni, “Da’wah Bil Hal Gaya Pesantren” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), hlm. 219-144. Lihat juga Arief Mudatsir, “Kajen Desa Pesantren” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, hlm. 197-218.

pelaksana model-model dakwah pengembangan masyarakat di Indonesia melaksanakan dakwah mereka secara berkesinambungan.

Persoalan besar terkait dengan kesinambungan pendidikan dan dakwah pengembangan masyarakat oleh pesantren adalah sumber pendanaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa model-model dakwah kemasyarakatan tersebut di atas, selain membutuhkan komitmen besar para pelaksananya untuk konsisten berdakwah, juga membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Ketersediaan dana pendukung merupakan keharusan bila pesantren ingin tetap bisa mengemban dua misi besar tersebut.

Konsep atau kegiatan yang bisa diambil oleh pesantren untuk mengatasi masalah kesinambungan adalah “Kewirausahaan Sosial”. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu metoda pengembangan masyarakat yang sekarang ini digunakan oleh banyak lembaga di Indonesia. Meskipun konsep ini telah muncul sejak tahun 1980-an di Eropa⁵, namun baru pada dekade 2000-an menjadi sebuah konsep matang dan digunakan sebagai cara bagi lembaga-lembaga sosial untuk memberdayakan diri sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar. Beberapa tahun belakangan, metoda ini mulai digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia.

Secara sederhana, kewirausahaan sosial adalah suatu metoda yang *menggabungkan kegiatan bisnis dan misi sosial*. Dalam pengertian tersebut, kewirausahaan sosial adalah upaya atau kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang memiliki misi sosial.

Meskipun sama-sama memiliki misi sosial, kewirausahaan sosial berbeda dengan organisasi nirlaba. Kewirausahaan sosial mengejar laba dalam kegiatan

⁵ Lihat Rachma Fitria, *Kewirausahaan Sosial*, terdapat di <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/rachma.fitriati/material/presentasisocialentrepreneurshiprachmafisipui.pdf>, (Diakses pada 15 Mei 2015)

bisnisnya, sedangkan organisasi nirlaba tidak. Demikian juga, meskipun sama-sama mengejar laba, kewirausahaan sosial berbeda dengan kewirausahaan konvensional. Perbedaannya adalah pada bagaimana laba digunakan. Jika kewirausahaan konvensional memperlakukan laba sebagai milik pribadi pemilik atau para pemiliknya, kewirausahaan sosial menggunakan laba yang diperoleh dari kegiatan bisnisnya untuk mendukung atau membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi misi dibentuknya lembaga tersebut.

Dengan demikian, kewirausahaan sosial memiliki keuntungan ganda. Pada satu sisi, kewirausahaan sosial mampu meningkatkan kemandirian keuangan sebuah lembaga sosial dari laba yang didapatkan dari bisnis yang dijalankannya. Di sisi lain, kewirausahaan sosial akan memberi dampak pada pengembangan masyarakat di sekitarnya, baik melalui pelibatan masyarakat sekitar dalam bisnis yang dijalankan, maupun melalui penggunaan laba hasil bisnis untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa kewirausahaan sosial akan mampu membuat sebuah lembaga sosial, termasuk pesantren, untuk bisa **berdaya** secara finansial dan **memberdayakan** masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini berupaya mengkaji kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh Pesantren El-Bayan di Majenang, Cilacap, untuk mendapatkan gambaran tentang pola dan model pelaksanaan, dampak yang ditimbulkannya, baik secara internal di pondok itu sendiri maupun secara eksternal untuk masyarakat di sekitar pondok dan juga masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga ingin mencari tahu dasar pemikiran apa yang mendorong pesantren ini menjalankan upaya kewirausahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, proposal ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan model Kewirausahaan Sosial yang dijalankan di pesantren Al-Bayan, Majenang?
2. Bagaimana dampak kewirausahaan Sosial di pesantren tersebut terhadap pengembangan masyarakat di sekitar pesantren?
3. Apa Dasar Pemikiran yang Melandasi pelaksanaan Kewirausahaan Sosial di Pesantren El-Bayan?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep dan model kewirausahaan sosial yang dijalankan di pesantren.
2. Mendapatkan pemahaman tentang dampak kewirausahaan Sosial di pesantren tersebut terhadap pengembangan masyarakat di sekitar pesantren.
3. Mendapatkan pelajaran tentang “praktik baik” di pesantren sebagai *role model* bagi pesantren-pesantren lain.

IAIN PURWOKERTO

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang hendak dilakukan adalah tentang kewirausahaan sosial dan dampaknya terhadap kemandirian pesantren dan pengembangan masyarakat sekitarnya. Topik kewirausahaan dan kewirausahaan sosial serta pengembangan masyarakat di dunia pesantren merupakan topik yang cukup menarik. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai topik ini. Di bawah ini diuraikan beberapa penelitian dimaksud.

Sebuah penelitian dilakukan oleh Lailatu Rohmah untuk penulisan tesis di UIN Sunan Kalijaga berjudul *Manajemen Kewirausahaan Pesantren (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo)*. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Putri Al-Mawaddah, Ponorogo. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa Keberhasilan Pesantren Putri al-Mawaddah dalam mengembangkan berbagai wirausaha didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jiwa wirausaha dan penerapan nilai-nilai wirausaha yang dimiliki oleh para pimpinan pesantren, networking yang dijalin dengan instansi lain, dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola berbagai wirausaha tersebut.⁶

Penelitian lain dilakukan terkait topik ini dilakukan oleh Madziatul Churiyah untuk penulisan disertasi Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang yang berjudul *Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Sosial Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Santri Di Pondok Pesantren Tradisional (Salafiyah)*. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Azhar Kec. Wajak Kab. Malang yang memiliki banyak santri dari keluarga tidak mampu. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pesantren mendidik santrinya untuk bisa mandiri dengan pengajaran kewirausahaan kepada mereka. Fokus ini terlihat dari tujuan penelitian ini, yaitu (1) Mendeskripsikan kewirausahaan sosial dan potensi lokal di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Azhar Wajak Kab. Malang, (2) Menghasilkan model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis potensi lokal yang telah melalui validasi ahli pembelajaran, ahli materi dan pengguna, (3) Mengimplementasikan pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis potensi lokal pada kelompok kecil dan kelompok besar, (4) Mengukur efektivitas pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis potensi lokal dalam meningkatkan

⁶ Lailatu Rohmah, *Manajemen Kewirausahaan Pesantren*, terdapat di <http://lailaturohmah.blogspot.com/2011/02/manajemen-kewirausahaan-pesantren.html> (diakses pada 15 Mei 2015).

kemandirian santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Azhar Wajak Kab. Malang.⁷

Satu lagi penelitian tentang topik kewirausahaan pesantren adalah penelitian yang dilakukan oleh H. Noor Ahmady, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2013 yang berjudul *Pesantren Dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri)*. Dari penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa (1) program pendidikan kewirausahaan di Pesantren sidogiri sudah lama diterapkan dengan jalan para santri iku terlibat langsung dalam pengembangan usaha Pesantren. (2) Pesantren Sidogiri Pasuruan telah mengembangkan usaha sejak lama dimulai dari BMT Pesantren Sidogiri dan berkembang ke unit-unit usaha yang lain diantaranya air mineral percetakan dll. (3) Melalui keterlibatan santri secara simultan Pesantren Sidogiri telah berhasil mendidik alumni untuk mempunyai usaha baru ditempat asal mereka tinggal. (4) Santri di Pesantren Sidogiri secara simultan dilibatkan langsung dalam pengembangan unit usaha.⁸

Dari tiga penelitian yang disebutkan di atas, ada satu kesamaan yang dimiliki oleh ketiganya, yaitu bahwa ketiga penelitian tersebut dilakukan dalam perspektif pendidikan kewirausahaan, yakni bagaimana pesantren mendidik dan membekali para santri dengan kemampuan kewirausahaan agar mampu menjadi manusia yang mandiri di masyarakat. Sementara itu, penelitian yang hendak dilakukan berdasarkan proposal penelitian ini adalah tentang pelaksanaan

⁷Madziatul Churiyah, *Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Sosial Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Tradisional (salafiyah)* (Malang: Universitas negeri Malang, 2014), terdapat di <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/37447> (diakses pada 15 Mei 2015)

⁸ Noor Ahmady, *Pesantren Dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri): Executive Summary* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013). Hlm. 1.

kewirausahaan sosial dan dampaknya dalam perspektif pengembangan masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewirausahaan sosial di pesantren dan dampaknya terhadap kemandirian pesantren dan pengembangan masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁹ dengan strategi studi kasus.

Penelitian studi kasus adalah strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.¹⁰

2. Obyek dan subyek penelitian

a. Obyek Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Obyek penelitian adalah entitas masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah kewirausahaan sosial yang dilaksanakan oleh pesantren.

⁹ Pendekatan kualitatif adalah metoda untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti di dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif harus menerapkan cara pandang penelitian bergaya induktif, fokus terhadap makna individual, dan menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Lihat John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4-5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

b. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipemasalahkan.¹¹ Adapun subyek penelitian ini adalah tiga pesantren sebagaimana tersebut di atas..

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berbagai pihak di pesantren (Kiai, Santri dan pengurus) untuk melihat pelaksanaan kewirausahaan sosial dan dampaknya terhadap kemandirian finansial pesantren, serta pihak-pihak terkait di masyarakat untuk menilai dampak pelaksanaan kewirausahaan sosial terhadap pengembangan masyarakat di sekitar pesantren.

Mengenai pemilihan informan untuk penggalian data penelitian ini, penulis menggunakan snowball sampling, yaitu mengidentifikasi beberapa informan kunci dan kemudian berdasarkan informasi yang diberikannya menggaet lebih banyak informan lainnya.¹²

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002 hal. 116

¹² Lihat C. Marlow, *Research Methods for Generalist Practice*. (3rded). (Toronto: Brooks/Cole, 2001), hlm. 143.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terangkum di dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan:

a. Kajian Dokumen (*Documental Review*)

Documental review digunakan untuk mengetahui segala macam aktivitas yang telah dilakukan serta capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh lembaga ini. Dengan documental review ini, penulis mampu menrace sejarah kemunculan serta proses perdebatan disekitar pemilihan model pengembangan masyarakat yang digunakan. Selain itu, documental review juga bisa digunakan untuk memverifikasi segala informasi yang didapatkan dari interview penulis dengan aktivis lembaga ini.

b. Pengamatan tidak terlibat (*Non-Participant Observation*)

Non-participant observation dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengembangan yang mereka laksanakan, sejak perumusan ide sampai aplikasinya. Sebagai non-participant observer, kehadiran penulis di dalam aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh lembaga ini adalah sebagai pengamat tanpa perlu melibatkan diri dengan mengambil peran aktif. Hasil dari pengamatan ini kemudian dijadikan dasar untuk melakukan wawancara dengan para aktivitas lembaga ini.

c. Wawancara semi terstruktur (*Semi structured interview*)

Semi structured interview digunakan untuk mengklarifikasi temuan-temuan dari dua metode sebelumnya, serta untuk mempertanyakan beberapa informasi penting yang tidak ditemukan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data di atas.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, yang merupakan *ratioale* mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan; rumusan masalah yang memfokuskan pada dua masalah yang akan dijawab oleh penelitian ini; kerangka teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisa data yang didapatkan; dan metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini.

Bab II Kerangka Konseptual. Bab ini menyajikan konsep-konsep terkait dengan pesantren, pengembangan masyarakat dan kewirausahaan sosial.

Bab III Gambaran Umum. Bab ini menyajikan gambaran umum Pesantren Al-Bayan dan kewirausahaan yang dijalankan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini memaparkan temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dan juga analisis terhadap temuan-temuan tersebut.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di bab sebelumnya serta rekomendasi yang bisa diberikan kepada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait kewirausahaan sosial pesantren.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pesantren

Pesantren Sebagai Pilar Utama Nahdlatul Ulama

Mendiskusikan pesantren orang tidak bisa meninggalkan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi sosial keagamaan di mana pesantren merupakan pilar utamanya¹³. Pesantren merupakan tempat di mana nilai-nilai dan wacana-wacana yang tumbuh dan berkembang di dalam NU diaplikasikan. Sebaliknya, dari pesantren norma-norma NU bersumber. Para kiai pesantren merupakan penjaga nilai-nilai keagamaan NU sehingga organisasi yang didirikan oleh para kiai ini mampu mempertahankan tradisi yang telah terbangun bertahun-tahun sejak awal berdirinya. NU memang identik dengan pesantren: para kiai dan kaum muslim pedesaan.¹⁴

Selain karena didirikan oleh para kiai, pertautan antara NU dan pesantren tampak jelas jika melihat komposisi kepengurusan NU sejak awal berdirinya sampai sekarang: NU selalu dipimpin oleh para kiai. Maka dari itu, pola kehidupan NU tidak bisa tidak mencerminkan pola kehidupan pesantren. NU merupakan cerminan dari pesantren, sehingga perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika di dalam pesantren bisa dibaca melalui perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika yang terjadi di dalam NU.

¹³ Machrus Irsyam, sebagaimana dikutip oleh KH. M. Sahal Mahfudh, menyatakan bahwa salah satu pilat utama kekuatan politik NU adalah basis massa yang terpusat di pesantren-pesantren yang biasanya tersebar di pedesaan-pedesaan. Lihat M. Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar", dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. xiii).

¹⁴ Lihat Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, hlm. 36.

Maka, pada level tertentu, tidak ada bedanya antara masyarakat pesantren dan masyarakat NU.

Fungsi Pesantren

Fungsi utama pesantren adalah sebagai tempat pengajaran dan pemasyarakatan ajaran-ajaran Islam. Fungsi ini, kemudian, teraplikasikan dalam dua level. *Pertama*, level internal. Pada level ini, pesantren memerankan diri sebagai lembaga pendidikan di mana para santri (murid) mendapatkan pelajaran berbagai macam disiplin ilmu keislaman yang diajarkan oleh kiai pesantren bersangkutan ataupun para *badal*¹⁵ sang kiai. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren biasanya menerapkan sistem jenjang pendidikan dari dasar hingga lanjutan.¹⁶ Pemilihan kitab apa yang diajarkan tergantung pada jenjang ini. Contohnya, dalam disiplin ilmu fiqih, kitab *fathul Qarib al-Mujib*, merupakan kitab dasar yang diajarkan kepada para santri di awal-awal pendidikannya di pesantren. Setelah menyelesaikan kitab ini, barulah dia mengaji kitab lain yang lebih kompleks.

Kedua, level eksternal, yaitu pengajaran agama kepada masyarakat umum. Pada level ini, kiai pesantren keluar untuk melayani permintaan masyarakat untuk memberikan pelajaran keagamaan di forum-forum pengajian. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai lembaga dakwah.

¹⁵*Badal* secara harfiah berarti pengganti. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang, biasanya santri senior, yang dianggap mampu dan dipercaya oleh kiai, sebagai penggantinya bila sang kiai berhalangan, untuk mengajarkan kitab kuning di pesantren.

¹⁶ Namun, jenjang di sini tidak lantas sama seperti jenjang kurikulum pendidikan formal di mana seorang siswa tidak bisa mengikuti pelajaran tingkat lanjut bila belum berhasil lulus pada pelajaran tingkat dasar. Di sebagian besar pesantren, para santrilah yang memutuskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pengajian kitab tertentu. Biasanya kiai memberikan berbagai alternative pilihan kitab dari yang dasar hingga yang kompleks, dan santri bebas memilih kitab apa yang hendak diikuti.

Kedua fungsi tersebut muncul karena memang pesantren tumbuh sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. KH. Sahal Mahfudh menganalogikan kemunculan pesantren dengan kemunculan pasar.¹⁷ Menurutnya, pesantren muncul karena kebutuhan masyarakat akan keberadaannya di tengah-tengah mereka. Ini seperti kebutuhan masyarakat terhadap pasar. Pasar, sebagai sebuah tempat di mana pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi untuk transaksi jual beli, lahir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Begitu juga pesantren. Pesantren muncul karena masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan mereka terhadap pengetahuan agama. Maka dari itu, Kiai Sahal Mahfudh menandakan bahwa tidak layak jika sebuah pesantren menjaga jarak dengan masyarakat sekitarnya. Pesantren, menurutnya, hendaknya memposisikan diri sebagai pusat rujukan bagi segala macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Implikasi dari fungsi itu adalah bahwa para kiai pesantren hendaknya menanamkan di dalam hati mereka kemauan untuk selalu mendedikasikan diri untuk “digunakan”, dan bukan “menggunakan”, umatnya.

Karena berfungsi pada dua level tersebut, seorang kiai biasanya tidak hanya memiliki pengaruh yang besar di dalam pesantren yang dipimpinnya saja, tetapi juga di masyarakat sekitar di mana sang kiai biasanya menyampaikan dakwah. Pengaruh yang besar ini seringkali membuat para kiai berada pada posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Posisi tawar yang tinggi ini menempatkan seorang kiai pada tempat istimewa di mana suaranya didengarkan. Bermanfaat atau tidaknya posisi ini bagi pemberdayaan masyarakat tergantung pada bagaimana sang kiai menggunakan posisi

¹⁷*Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), 1994), hlm. 342.

istimewa yang dimilikinya: memanfaatkan umat untuk kepentingan diri ataukah memanfaatkan diri untuk kepentingan umat.

Elemen-elemen Pesantren

Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa sebuah lembaga disebut pesantren jika memiliki lima elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, serta kiai¹⁸.

Pondok atau asrama merupakan suatu kompleks bangunan yang biasanya terdiri dari kamar-kamar yang digunakan sebagai tempat para santri mukim menginap. Keberadaan *pondok* sebagai tempat tinggal santri, menurut Gus Dur, mengimplikasikan totalitas pendidikan yang ditempuh oleh para santri.¹⁹ Gus Dur menyamakannya dengan akademi militer di mana para santri mukim²⁰ secara total mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan dengan sekian peraturan tertentu yang harus ditaati dan jam pelajaran yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.

Masjid memiliki dua fungsi. pertama, ia digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah: shalat, membaca al-qur'an, i'tikaf dan sebagainya. Sementara fungsi keduanya adalah sebagai tempat untuk

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, "Prospek Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar Internasional "The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1988), hlm. 266.

²⁰ mengenai pengertian santri mukim lihat di bawah

melakukan proses belajar-mengajar²¹. Biasanya pengajian kitab diberikan setelah selesai melaksanakan shalat wajib. Sehingga dengan demikian hampir seluruh waktu para santri dihabiskan di masjid.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning) merupakan ciri khas dari pesantren. Meskipun sekarang banyak pesantren yang memberikan juga pelajaran-pelajaran umum, namun pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan. Tujuan dari pengajaran kitab-kitab klasik ini adalah untuk mempersiapkan seorang santri untuk menjadi ulama kelak di kemudian hari. Ini sesuai dengan tujuan didirikannya pesantren yaitu untuk *tafaqquh fi al-din*.

Dhofier mengklasifikasikan ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di dalam pesantren ke dalam delapan kelompok, yaitu nahwu dan sharaf; fiqh; usul fiqh; hadits; tafsir; tauhid; tasawuf dan etika; dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.

Santri adalah murid yang belajar di pondok pesantren. Ada dua jenis santri yaitu santri mukim, atau santri yang tinggal menetap di pondok, dan santri kalong, yaitu santri yang tidak menetap, yang biasanya berasal dari

IAIN PURWOKERTO

²¹ Tetapi sekarang banyak pesantren yang membuka madrasah-madrasah, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Sehingga selain masjid, pesantren-pesantren tersebut memiliki ruang-ruang kelas sebagai tempat di mana pelajaran-pelajaran diberikan. Namun demikian, fungsi masjid sebagai tempat pengajaran kitab kuning di sebagian besar pesantren tetap dipertahankan. Di sekolah-sekolah yang membuka kelas pendidikan formal, seperti Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, atau Madrasah Aliyah, jenjang kelas antara pendidikan formalnya dengan pendidikan kitab kuning yang diberikan di luar kelas formal tidak berkorelasi secara positif. Dalam arti bahwa santri yang berada di kelas yang lebih tinggi dalam kelas pendidikan formal, mungkin lebih rendah kelasnya dalam pendidikan kitab kuning. Contohnya, seorang santri yang masuk ke pesantren saat kelas I MA, harus mengikuti pendidikan kitab kuning yang lebih rendah kelasnya dari santri yang berada di kelas III MTs, tetapi dia masuk pesantren sejak kelas I MTs.

sekitar pondok. Santri kalong ini datang ke pesantren untuk mengikuti pengajian-pengajian kitab kuning yang diberikan oleh kiai pesantren saja.²²

Kiai merupakan elemen terpenting dari lima elemen yang disebutkan oleh Dhofier. *Kiai* memegang status yang sangat tinggi, bukan hanya di dalam pesantren di mana mereka memegang kekuasaan dan kewenangan, tetapi juga di dalam kehidupan sosial masyarakat di mana pesantren tersebut berada.

Kiai dan Kitab Kuning: Penjaga Kestinambungan Pemikiran Keagamaan Komunitas Pesantren

KH Hasyim Asy'ari, pendiri dan pemimpin pertama NU yang bergelar Hadhratus Syaikh²³ di dalam jagad NU, pernah menyatakan bahwa

“Dalam mengadakan istinbath, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari ijmak. Istinbath harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dan dalam hal ini harus

²² Fenomena umum di pesantren adalah bahwa kiai tidak membatasi peserta pengajian kitab-kuning hanya pada santri yang masuk ke pesantrennya saja, tetapi memperbolehkan siapa saja yang ingin mengikuti pengajian untuk datang dan bergabung di dalam pengajian yang diselenggarakan, tanpa harus melakukan pendaftaran atau mengeluarkan uang untuk pembayaran keikut-sertaannya. Di wilayah-wilayah di mana banyak pesantren didirikan, biasanya para santri mengikuti pengajian bukan hanya di pesantren di mana dia terdaftar, tetapi juga di pesantren-pesantren lain yang berdekatan dengan pesantren yang ditempatinya.

²³ Hadhratus Syaikh diterjemahkan oleh Abdurrahman Mas'ud sebagai Bapak Spiritual. Satu-satunya ulama dan pemimpin NU yang mendapat gelar ini hanya KH Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, di dalam komunitas NU, orang biasanya tidak menyebut sang *Kiai* dengan namanya yang lengkap tetapi hanya dengan gelar ini saja. Jika disebut nama Hadhratus Syaikh, maka orang NU akan segera mafhum bahwa yang dimaksud adalah KH Hasyim Asy'ari. Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 247.

menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya. Apabila berpegangan pada pendapat ulama-ulama salaf merupakan kemestian, maka pendapat-pendapat mereka harus diriwayatkan dengan sanad yang valid, atau tertulis dalam buku-buku yang masyhur. Harus dijelaskan pendapat yang mana yang unggul dari pelbagai pendapat yang mungkin, dijelaskan pula pendapat-pendapat 'am yang ditakhsis (dikhususkan), yang mutlaq di taqyid (dibatasi maknanya) di beberapa tempat (kasus), mengkompromikan hal-hal yang diperselisihkan, dan dijelaskan illat-illatnya".²⁴

Pernyataan KH Hasyim Asy'ari sebagaimana dikutip di atas menegaskan arti penting kesinambungan di dalam penetapan hukum atas suatu fenomena di masyarakat. Penetapan hukum atas suatu masalah yang muncul dilakukan dengan sedapat mungkin tetap merujuk kepada pendapat para imam madzhab terdahulu agar tidak terjadi suatu bentuk penyelewengan ajaran Islam. Untuk menjaga kesinambungan tersebut, ada dua elemen yang sangat penting, yaitu para kiai yang meriwayatkan ajaran para ulama salaf dalam suatu sanad (rantai transmisi) pengetahuan dan kitab kuning (buku-buku yang masyhur) di mana buah pemikiran ulama-ulama terdahulu terdokumentasikan dengan baik.

Senada dengan KH Hasyim Asy'ari, Gus Dur menyatakan bahwa dari kelima elemen pesantren yang disebutkan oleh Zamaksyari Dhofier tersebut, kiai dan pengajaran kitab-kitab kuning, atau dalam bahasa Gus Dur literatur universal, merupakan elemen terpenting. Dua elemen inilah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan elemen terpenting ketiga, yaitu sistem

²⁴ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 38.

nilai pesantren. Ketiga elemen tersebut membuat pesantren menjadi sebuah sub-kultur dalam masyarakat Indonesia.²⁵

Gus Dur menyebut kitab-kitab kuning yang diajarkan di dalam pesantren sebagai literatur universal. Penyebutan ini mengimplikasikan kemampuan kitab kuning untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang sebagai rujukan bagi pesantren dalam memberikan dasar keagamaan bagi segala tata nilai dan aktivitas mereka.

Kemampuan kitab kuning untuk bertahan sekian lama tentu saja tidak terlepas dari peran kepemimpinan kiai di dalam pesantren. Di dalam tradisi pesantren, ulama dianggap bertanggung-jawab terhadap pemeliharaan tradisi Islam “yang benar”. Peran ini didasarkan pada keyakinan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang memiliki otoritas untuk memberi penjelasan mengenai kandungan al-Qur’an dan Hadits, dua sumber ajaran Islam. Karenanya para kiai memiliki posisi sebagai pengabsah bagi ajaran agama dan juga pemberi legitimasi religius bagi segala aktivitas sosial kemasyarakatan dengan kemampuan mereka memberikan landasan hukum bagi fenomena yang ada di sekitar mereka berdasarkan pada kitab-kitab kuning yang menjadi landasan mereka.²⁶

Kemampuan kitab-kitab klasik untuk bertahan di dalam pesantren bisa terwujud karena adanya rantai intelektual (*sanad*) di dalam pesantren. Rantai intelektual ini muncul karena adanya kebutuhan seorang kiai atas keabsahan ilmu yang didapatnya saat dia *nyantri* kepada seorang kiai lain yang terkenal keilmuan agamanya.²⁷ Ada semacam kode etik di dalam dunia pesantren

²⁵ Abdurrahman Wahid, “Prospek Pesantren”, hlm. 266.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

²⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 79.

bahwa kepakaran seorang kiai atas suatu disiplin ilmu keagamaan tertentu mesti disertai dengan rantai transmisi ilmu (*sanad*).²⁸ Seorang kiai yang tidak mampu menunjukkan rantai transmisi bidang keilmuan yang dikuasainya, maka kemampuannya di bidang disiplin ilmu tersebut diragukan atau bahkan tidak diakui dan dianggap tidak syah.

Oleh karena itulah, tradisi pendidikan di dalam pesantren sangatlah mengagungkan sang guru. Di dalam kitab *Ta'lim al-Muta'alim*, sebuah kitab tentang etika pendidikan yang sangat luas digunakan oleh kalangan pesantren, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapat ilmu adalah petunjuk guru (*irsyadu ustadzin*).²⁹ Ini artinya bahwa untuk menguasai suatu ilmu mestilah ada proses transmisi dari kiai ke santri.

Posisi guru sangatlah penting di dalam transformasi pengetahuan di dalam pesantren. Karena itulah maka seorang kiai pesantren tidak selayaknya melupakan jasa guru tempat dia menimba ilmu pada masa lalu. Berdasar pandangan ini, maka seringkali sebelum seorang kiai memulai pengajaran kitab-kitab kuning kepada santrinya, dia mengajak para santri untuk mengirimkan doa kepada gurunya. Pengiriman doa ini juga dimaksudkan untuk meminta izin sang guru agar meridlainya dalam mentransimikan pengetahuan yang dulu didapatnya dari gurunya tersebut.

Dalam rangka untuk mempersiapkan penerus untuk mengelola pesantren, banyak kiai di Jawa mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada kiai lain. Karena tradisi inilah maka rantai intelektual antar pesantren terbentuk. Ini berarti antara satu pesantren dengan pesantren lainnya relatif

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ibrahim bin Ismail, *Syarh al-Ta'lim al-Muta'allim*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuh, tt), hlm. 15.

memiliki keterikatan secara intelektual dan kesamaan dalam prinsip keberagamaan.

Fikih sebagai Panglima

Fiqh merupakan panglima dalam kehidupan kaum NU dan, tentu saja, pesantren. Fikih merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keabsahan perilaku yang dijalankan serta keputusan-keputusan yang diambil baik secara individu maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.³⁰ Artinya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pesantren, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, selalu dicarikan rujukannya di dalam ajaran-ajaran keagamaan. Segala realitas sosial dimaknai di dalam kerangka fikih. Dalam konteks inilah, pemahaman mengenai kaidah-kaidah fikih merupakan keniscayaan bila orang ingin memahami apa yang dilakukan oleh masyarakat pesantren.

Sikap berpegang erat terhadap fikih ini, menurut Badrun Alaena, adalah wujud dari kehati-hatian warga NU, dan sekali lagi tentu saja pesantren, dalam bertindak-laku. Boleh-tidaknya atau sah-tidaknya suatu perbuatan dilakukan didasarkan pada bagaimana fikih memberi batasan atau aturan.³¹

Sikap berpegang teguh kepada fikih tampaknya terkait dengan sebuah pandangan yang dipegangi oleh masyarakat pesantren terkait dengan ijtihad

³⁰ Hairus Salim dan Nuruddin Amin, "Ijtihad dalam Tindakan" kata pengantar editor dalam M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), 1994), hlm. v. Lihat juga Badrun Alaena, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 53-54.

³¹ Badrun Alaena, *NU*, hlm. 54.

dan taklid. Bagi mereka, ijtihad merupakan suatu aktivitas yang sangat sulit untuk dilakukan yang hampir mustahil untuk dilakukan oleh orang-orang awam. Ada batasan dan aturan yang sangat ketat yang mengatur siapa yang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu hukum agama untuk suatu fenomena yang ada di sekitar mereka, masyarakat pesantren memilih “jalan paling aman” dengan mengikuti hasil-hasil ijtihad para imam madzhab yang dianggap lebih kompeten dan *reliable*. Prinsipnya adalah lebih baik mengikuti ulama masa lalu yang lebih berkompoten ketimbang memutuskan hukum sendiri tetapi berkemungkinan salah. Inilah wujud dari kehati-hatian masyarakat pesantren dalam menjalani kehidupan keagamaan. Terkait dengan hal ini, menarik untuk menyimak apa yang ditulis oleh kiai Sahal Mahfudh:

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil hukum langsung secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi, penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *nash-nash* fuqaha—dalam hal ini syafi'iyah—dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Istinbath langsung dari sumber primer (Al-Qur'an dan hadits) yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam batas madzhab, disamping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami *'ibarat* (uraian) kitab-kitab fikih, sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu, kalimat *istinbath* di kalangan NU, terutama dalam kerja bahtsul masail Syuriyah, tidak populer. Kalimat itu telah dipopulerkan di kalangan ulama NU dalam konotasi ijtihad mutlak, suatu aktivitas yang oleh ulama Syuriyah masih berat untuk dilakukan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* melalui referensi (*maraji'*) *kutub al-fuqaha'*.³²

Pandangan semacam ini tampaknya merupakan pandangan resmi yang dipegang secara berkesinambungan oleh NU secara organisasi. *Hadhratus Syaikh* KH. Hasyim Asy'ari, pendiri dan pemimpin pertama NU, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Mas'ud, menyatakan di hadapan warga NU pada muktamar NU ke-3 yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1928 berbagai argumen tentang taqlid dalam *Qanun Asasi* Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

Terdapat beberapa masalah dalam ber-taqlid. Pertama, mayoritas Muslim telah ditakdirkan untuk mengikuti kaum salaf dalam memahami syari'at. Hal yang sama telah terjadi pada para tabi'in, yang menerima ajaran-ajaran dari para sahabat Nabi. Penyampaian ajaran ini dilanjutkan oleh ulama selama berabad-abad. Akal sehat akan menganjurkan bahwa jenis pemahaman ini sangat baik (excellent), karena syari'at tidak akan dipahami secara terpisah dari istinbath dan naql (penemuan dan pemindahan). Kedua, Nabi mengingatkan kaum Muslim untuk "mengikuti yang mayoritas". Sejarah menunjukkan bahwa ada begitu banyak madzhab yang tenggelam dan akhirnya tak dikenal. Semua sepakat bahwa

³² M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 24-25.

iamam tersebut adalah yang paling dominan. Ketiga, jarak antara kita dan Nabi adalah begitu panjang yang mana amanah sangat sulit ditemukan pada saat ini. Hanya sedikit ulama, qadhi, dan mufti yang bisa dipercaya. Dalam situasi seperti ini, hampir tak seorangpun yang layak untuk ditiru. Mereka yang benar-benar mengikut salafas-salih akan beruntung sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "mereka yang ingin menjadi seorang muqallid terpercaya harus mengikuti ulama pada masa lalu".³³

Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa ketika fikih merupakan suatu bangunan sangat baku yang menentukan sah tidaknya perilaku seseorang secara hitam putih, maka akan banyak muncul dilema yang dihadapi oleh komunitas pesantren ketika melakukan kerja-kerja pengembangan masyarakat. Dalam wataknya yang kaku, fikih kemudian lebih berperan sebagai "juri" yang menyatakan benar tidaknya atau sah tidaknya sebuah realitas sosial ketimbang sebagai alat pemecahan problem-problem sosial kontemporer.

Untuk menghindarkan diri dari dilema semacam itu, kelompok-kelompok kiai muda NU dengan dukungan dari Rabitah Ma'ahid al-Islamy (RMI), organisasi persatuan pesantren di Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) melakukan serangkaian *halaqah* untuk merumuskan fikih baru yang diharapkan akan mampu menjadi alat bagi pemecahan problem-problem sosial. Hasil dari serangkaian tersebut adalah dirumuskannya Fikih Sosial.³⁴

³³ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, hlm. 265-266.

³⁴ M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxxv.

Ada lima ciri pokok dari fikih sosial ini, yaitu

1. kontekstualisasi teks-teks fikih,
2. pergeseran pola bermadzhab dari bermadzhab secara *qauly* (tekstual) ke bermadzhab secara *manhajy* (metodologis),
3. pembedaan yang jelas antara ajaran pokok (*ushul*) dan ajaran tidak pokok (*furu'*),
4. fikih dihadirkan sebagai lebih sebagai etika sosial ketimbang sebagai hukum positif Negara, dan
5. pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.³⁵

Dengan paradigma baru ini maka fikih kemudian tampil menjadi lebih empatik dan luwes dalam memandang problem-problem sosial kekinian yang dihadapi masyarakat. Dengan keluwesannya tersebut, maka para kiai akan mampu secara kreatif merumuskan program-program kemasyarakatan untuk menjawab masalah-masalah sosial baru sesuai dengan konteks kekinian tanpa harus meninggalkan sama sekali warisan pemikiran hukum Islam yang telah dicapai oleh para ulama madzhab pada zaman dahulu. Dengan kaidah “*memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik*” fikih akan terus mampu berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tanpa harus terasing, atau mengasingkan diri, dari denyut perkembangan zaman.

Moderat sebagai Sikap

³⁵*Ibid.* Lihat Juga Badrun Alena, *NU*, hlm. 140.

Dalam berkhidmat kepada kerja-kerja kemasyarakatan, NU mengembangkan empat sikap kemasyarakatan, yaitu *tawasuth*³⁶ (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang dan selaras), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (selalu siap menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan).³⁷ Empat sikap tersebut menjadi semacam rambu-rambu atau paradigma berpikir bagi orang-orang NU dan, tentu saja, bagi kaum pesantren yang merupakan pilar utama NU.

Karena masyarakat pesantren, dan pada level yang lebih luas masyarakat NU, merupakan masyarakat fikih sebagaimana disebutkan di atas, maka empat sikap tersebut, sesungguhnya didasarkan pada kaidah-kaidah fikih yang merupakan sandaran komunitas pesantren dalam bertindak.

Berikut beberapa kaidah yang sangat populer digunakan oleh komunitas NU dalam membangun sikap sosial kemasyarakatan dan keberagamaan mereka.

1. menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan.
2. apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadah, maka harus dipertimbangkan mana yang mengandung resiko lebih besar, dan melaksanakan resiko yang lebih kecil.

³⁶Konsep *tawasuth* sangat menarik di dalam kajian pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren. Konsep yang menuntut komunitas pesantren untuk bersikap moderat dalam memecahkan problem-problem kemasyarakatan ini berbenturan dengan sifat radikal yang terkandung di dalam model social action. Ada dilema yang dihadapi oleh komunitas pesantren ketika menggunakan model social action dalam aktivitas pengembangan masyarakat yang mereka lakukan. Dalam benturan tersebut maka mereka harus mengambil sikap moderat dalam radikalisme atau radikal dalam moderatisme.

³⁷ Badrun Alaena, *NU*, hlm. 6, 53, 143.

3. kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan syarat tertentu, maka syarat itu menjadi wajib pula.
4. apa yang tidak bisa diperoleh seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.
5. apabila keadaan sempit lapangkanlah dan apabila keadaan lapang persempitlah.
6. memelihara hal lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.
7. Keadaan darurat memperbolehkan segala sesuatu yang semula dilarang.

Saat membahas pemikiran politik NU, Andree Feillard menyimpulkan bahwa tradisi Sunni yang dianut oleh NU merupakan sumber bagi sikap moderat tersebut. Mengenai hal ini Feillard menyatakan

Pemikiran politik NU berdasarkan pada tradisi Sunni yang sangat sesuai dengan tradisi Jawa: tradisi Sunni bisa mengakui keabsahan seorang raja bila pemerintahannya membawa ketertiban dan menjauhkan kekacauan (fitnah). Jalan “tengah” ini sesuai dengan tradisi Jawa yang ditandai oleh pencarian terhadap suatu harmoni yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Sikap jalan tengah ini, menurut Feillard, juga didukung oleh kenyataan bahwa NU berbasis di pedesaan. Dalam hal ini Feillard menulis

Pencarian keselarasan merupakan hal yang sangat penting bagi para ulama yang hidup lebih dekat dengan masyarakat pedesaan,

³⁸ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), 1999), hlm. 413.

*ketimbang kaum reformis yang sering adalah intelektual yang berasal dari lingkungan perkotaan. Kelihatannya, keyakinan bahwa sikap inilah yang benar semakin diperkuat setelah kekerasan antar-komunitas bertambah di Asia Selatan.*³⁹

Berdasar pada analisisnya di atas, Feillard menyatakan perlunya meninjau kembali anggapan bahwa NU merupakan gerakan oportunistik yang banyak disuarakan oleh para sejarawan terdahulu.⁴⁰ Bagi Feillard, sikap akomodatif yang ditunjukkan oleh NU bukanlah disebabkan oleh sikap oportunistik NU, namun lebih karena didasari oleh sikap yang berkembang di dalam komunitas NU untuk mencari keselarasan dan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa kasus di dalam sejarah NU bisa menjadi contoh dari keteguhan untuk memegang sikap jalan tengah tersebut. Diantaranya adalah penyebutan Hindia Belanda sebagai “Darul Islam”⁴¹ pada tahun 1938, pemberian dukungan terhadap Soekarno dengan memberinya gelar “waliyyul amri al-daruri bisy-syaukah”⁴² pada tahun 1954, pencanangan

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Dalam konteks ini, Darul Islam dipakai bukan dalam arti “Negara Islam”, tetapi dalam arti “kawasan Islam”, yakni Hindia Belanda merupakan kawasan yang dihuni oleh umat Islam sebagai mayoritas. Lihat Mitsuo Nakamura, “Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984”, dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 82-83.

⁴² Penganugerahan gelar ini dilakukan di tengah berkecamuknya pemberontakan DI/TII. Dalam konteks ini NU memandang bahwa Indonesia adalah Negara yang sah menurut hukum Islam dan bahwa kepala pemerintahannya berhak ditunjuk sebagai wali hakim untuk melaksanakan tugasnya. *Ibid.*, hlm. 83.

keikutsertaan NU di dalam Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno⁴³ oleh KH. Wahab Chasbullah pada tahun 1960, pengusuran Subchan ZE pada tahun 1972, serta keputusan untuk keluar dari PPP dan kembali ke khittah pada 1984.⁴⁴ Kesemua kasus itu menegaskan kemauan keras NU untuk mengutamakan keharmonisan ketimbang konflik di dalam kehidupan.

Dengan pandangan jalan tengah tersebut, maka masyarakat pesantren selalu berusaha melakukan perubahan sosial, jika itu memang perlu dilakukan, dengan tanpa menciptakan konflik⁴⁵.

B. Pengembangan Masyarakat

Pekerjaan Sosial (*Social Work*) sebagai sebuah disiplin ilmu dan juga sebagai sebuah aktivitas profesional memiliki tiga level pekerjaan, yaitu level mikro, mezzo, dan makro.⁴⁶

Level mikro adalah praktek pekerjaan sosial yang memfokuskan diri pada individu. Pada level ini, pekerja sosial membantu satu individu untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh individu tersebut.

IAIN PURWOKERTO

⁴³ Penerimaan sistem Demokrasi Terpimpin ini didasarkan pada pandangan bahwa NU harus menghindari bahaya “vakum” yang akan terjadi bila wakilnya tidak lagi duduk di DPR atau di pemerintahan. NU harus ikut menentukan dari dalam sebagai tanggung-jawab untuk menyelamatkan umat. Lihat André Feillard, *NU vis-à-vis Negara*., hlm. 413-414.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 413-414.

⁴⁵ Meskipun ada sejumlah kecil kasus di mana beberapa kiai memilih jalan radikal, namun semuanya bermuara pada pencarian jalan tengah pada akhirnya. Lihat Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 414.

⁴⁶ Charles H. Zastrow, *The Practice of Social Work* (California: Brooks/Cole Publishing Company, 2002), hlm. 22.

Level mezzo (menengah) adalah praktek pekerjaan sosial yang memfokuskan diri pada penyelesaian masalah sosial pada level keluarga atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Praktek pekerjaan pada level ini tidak jauh berbeda dengan level mikro, hanya saja klien yang ditangani bukanlah satu individu tetapi sekelompok orang dalam jumlah terbatas.

Level makro adalah pekerjaan sosial pada level masyarakat secara luas yang terkenal sebagai kerja kemasyarakatan (Community Work). Kerja Kemasyarakatan (Community Work) disebut dengan banyak nama di dalam berbagai literatur Ilmu Pekerjaan Sosial. Selain Community Work, ia juga dikenal dengan sebutan *Macro Level Social Work* (Kerja Sosial Tingkat Makro), *macro social work*,⁴⁷ *community practice*,⁴⁸ *community social work*, *community work*,⁴⁹ *Macro Practice Social Work* (Praktek Kerja Sosial Tingkat Makro),⁵⁰ *Community Social Work* (Kerja Sosial Kemasyarakatan), *Community Practice* (Praktik Kemasyarakatan) dan *Community Development* (Pengembangan Masyarakat).⁵¹ Di dalam buku ini istilah yang

⁴⁷ William G. Brueggemann, *The Practice of Macro Social Work*, 2nd ed. (California: Brooks/Cole Publishing Company, 2002), hlm. 3.

⁴⁸ Charles H. Zastrow, *The Practice of Social Work*, hlm. 230-257.

⁴⁹ Paul Henderson, "Community Work" dalam Martin Davies dan Rose Barton (ed.), *The Blackwell Encyclopaedia of Social Work* (Oxford: Blackwell Publishers, 2000), hlm. 72-74.

⁵⁰ Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work*, 3rd ed. (Boston: Pearson, 2004), hlm. 5.

⁵¹ Istilah *Community Development* atau Pengembangan Masyarakat merupakan istilah generik untuk pekerjaan sosial pada tingkat masyarakat atau makro. Namun, banyak penulis yang menggunakannya dalam arti "locality development" atau pengembangan masyarakat lokal, yakni, salah satu model di dalam pengembangan masyarakat. Di Indonesia, kata Pengembangan Masyarakat yang seringkali digunakan juga merujuk pada makna "locality development". Lebih jauh mengenai "locality development", lihat pembahasan mengenai model-model pengembangan masyarakat di halaman-halaman selanjutnya.

dipakai untuk menyebut pekerjaan sosial tingkat makro adalah Pengembangan Masyarakat.

Macro level social work atau pengembangan masyarakat didefinisikan oleh Ellen Netting, Peter Kettner dan Steven McMurtry sebagai “aktivitas yang terarah secara profesional yang didesain untuk menciptakan perubahan yang terencana di dalam organisasi dan masyarakat”.⁵²

Sementara itu, Brueggemann mendefinisikan *macro practice* sebagai “aktivitas membantu masyarakat memecahkan masalah sosial dan menciptakan perubahan sosial pada level komunitas, organisasi, masyarakat, dan juga level global”.⁵³

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik satu benang merah, yaitu bahwa pengembangan masyarakat adalah sebuah upaya terencana yang didesain untuk membuat perubahan sosial di dalam suatu komunitas atau masyarakat yang sedang bergelut masalah sosial.

Batasan Masyarakat

Pengembangan Masyarakat memfokuskan upayanya untuk menciptakan perubahan pada level masyarakat. Istilah masyarakat seringkali dipahami hanya dalam pengertian kesamaan geografis. Di dalam pengertian ini, masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup di dalam

⁵²*Professionally guided intervention designed to bring about planned change in organizations and communities.* Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 6.

⁵³*The practice of helping people solve social problem and make social change at the community, organizational, societal, and global levels.* William G. Brueggemann, *The Practice of Macro Social Work*, hlm. 3.

suatu batas wilayah tertentu semisal Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, kecamatan, dan sebagainya. Pengertian semacam ini merupakan pengertian tradisional yang banyak dipahami orang. Pengertian ini merupakan satu dari dua pengertian masyarakat yang digunakan di dalam disiplin Pengembangan Masyarakat.

Mayo, sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, memberikan dua arti untuk istilah masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas pengembangan masyarakat, yaitu masyarakat dalam pengertian kesamaan geografis, sebagaimana disebutkan di atas, dan masyarakat sebagai kepentingan bersama.⁵⁴

Dalam pengertian kepentingan bersama, masyarakat memiliki arti sekelompok individu yang menyatu karena memiliki kebutuhan yang sama berdasarkan kebudayaan, minat, atau identitas meskipun mereka tidak berada di dalam batas wilayah geografis yang sama. Contohnya adalah kepentingan bersama kaum perempuan untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender. Atau kelompok individu-individu yang mengidap AIDS yang memiliki kepentingan bersama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkait dengan penyakit yang mereka derita.

IAIN PURWOKERTO

Profesional versus Radikal: Dua Bingkai Pendekatan Pengembangan Masyarakat

⁵⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kaesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 39.

Twelvtrees, sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, membagi perspektif yang membingkai aktivitas pengembangan masyarakat ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal.⁵⁵

Pendekatan profesional, di dalam penjelasan Suharto, disebut sebagai pendekatan yang “bermatra tradisional, netral, dan teknikal”.⁵⁶ Pendekatan ini menekankan pada pandangan tradisional bahwa pengembangan masyarakat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menciptakan perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri dan juga meningkatkan sistem pelayanan sosial yang bermuara pada peningkatan taraf kehidupan anggota masyarakat.

Pendekatan profesional bersifat netral, dalam arti bahwa ia tidak memandang adanya konflik antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat, yang kemudian memaksa para aktivis pengembangan masyarakat untuk berpihak kepada pihak yang tertindas. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas pengembangan masyarakat, para praktisi yang memegang pendekatan ini berusaha sedapat mungkin agar mampu menarik partisipasi berbagai elemen yang ada di dalam suatu relasi sosial dan struktur kekuasaan di dalam suatu sinergi yang membawa kepada pencapaian pemecahan masalah.

Pendekatan profesional juga bersifat teknikal, dalam arti bahwa pendekatan ini menekankan arti penting kerja-kerja teknis yang bersentuhan langsung dengan para anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan peningkatan taraf hidup melalui upaya-upaya yang bisa dirasakan hasilnya secara langsung.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 40-41.

⁵⁶*Ibid.*

Sementara pendekatan radikal disebut sebagai “pendekatan yang bermatra transformatif”, di mana berangkat dari teori struktural neo-Marxis, feminisme, dan anti-rasis, pendekatan ini menekankan aktivitas pengembangan masyarakat pada upaya untuk merubah ketimpangan di dalam sistem relasi sosial⁵⁷ dan struktur kekuasaan, dengan berpihak kepada kelompok marjinal dan tertindas di dalam ketimpangan relasi sosial tersebut untuk mengkonfrontasi kelompok kuat dan penindas.

Model-model Kerja Kemasyarakatan

Sebagai sebuah ilmu terapan, Kerja Sosial Level Makro dibangun di atas pondasi pemahaman para praktisinya terhadap empat elemen kerja kemasyarakatan. Empat elemen tersebut adalah teori dan model, nilai dan etika, peran dan ekspektasi seorang professional, dan akar kesejarahan.⁵⁸

Teori dan model adalah dua entitas yang saling terkait, Teori memberikan basis bagi para praktisi untuk memahami kondisi-kondisi yang hendak dirubah, sementara model merupakan petunjuk praktis mengenai bagaimana pemahaman para praktisi mengenai kondisi tersebut hendak diaplikasikan pada level praktis. Atau dengan kata lain, teori membangun pemahaman mengenai masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, sementara model memberikan arahan mengenai bagaimana masalah-masalah bisa dipecahkan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, sebagaimana dinyatakan oleh Ellen Netting, Peter Kettner dan Steven McMurtry :

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 11.

Teori adalah serangkaian konsep dan construct yang saling terkait yang memberi kerangka untuk memahami bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Model memberikan petunjuk dan arahan bagi para praktisi. Teori memberi alat untuk merenungkan masalah atau kebutuhan, sedangkan model memberi petunjuk untuk melakukan aksi dan intervensi.⁵⁹

Model merupakan petunjuk praktis mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Model memberikan tuntunan dan arahan aksi dan intervensi kepada para praktisi pengembangan masyarakat. Selain itu, model merupakan penjabaran praktis dari berbagai teori yang mendasari aktivitas pengembangan masyarakat.

Oleh karena itu, model yang dipilih oleh para praktisi pengembangan masyarakat merefleksikan perspektif dan teori yang diikuti oleh para praktisi tersebut dalam upaya mereka untuk memahami masyarakat dan masalah sosial yang mereka hadapi serta perubahan macam apa yang diinginkan. Misalnya, di sebuah komunitas yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, praktisi pengembangan masyarakat yang berperspektif reformisme akan berupaya untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan masyarakat mendapatkan air bersih secara mudah (model *locality development*). Sementara praktisi pengembangan masyarakat yang menganut pandangan transformatif akan menggali akar dari masalah tersebut, misalnya kerusakan lingkungan karena tata-kota yang tidak baik,

⁵⁹*Theories are sets of interrelated concepts and constructs that provide a framework for understanding how and why something works or does not work. Models provide guidance and direction for the practitioner. Theories provide the tools for thinking about a problem or need, whereas models provide guidelines for action and intervention. Ibid., hlm. 11-12.*

dan kemudian melakukan berbagai upaya agar pemerintah membenahi tata-kota yang tidak ramah lingkungan tersebut (model *social action*).⁶⁰

Pengembangan Masyarakat memiliki beberapa model kerja. Ada banyak formula model kerja yang ditawarkan oleh berbagai pakar pekerjaan sosial. Diantara sekian banyak formula yang ditawarkan, formula model Pengembangan Masyarakat yang dikemukakan oleh Jack Rothman merupakan formula yang paling terkenal dan banyak dikutip serta dikembangkan oleh para pengkaji dan praktisi pekerjaan sosial setelahnya.⁶¹

Formula Model Pengembangan Masyarakat Tiga Arah Jack Rothman

Rothman mengajukan tiga model Pengembangan Masyarakat, yaitu *locality development* (pengembangan masyarakat lokal), *social planning* (perencanaan sosial) dan *social action* (aksi sosial). Dilihat dari pendekatan yang digunakan, *locality development* dan *social planning* termasuk dalam kategori model pengembangan masyarakat profesional, sedangkan *social action* merupakan model pengembangan masyarakat yang berpendekatan radikal.

Locality development

Locality development (pengembangan masyarakat lokal) adalah model yang berupaya menarik berbagai macam elemen dari sutau lingkungan

⁶⁰ Perspektif reformisme dan transformatif yang digunakan di dalam contoh ini mengacu pada pembagian perspektif praktisi pengembangan masyarakat di Indonesia oleh Mansour Fakih. Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideology LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

⁶¹ David A. Hardcastles, Patricia R. Powers, dan Stanley Wenocur, *Community Practice: Theories and Skills for Social Workers*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 52-53. Lihat juga Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 156.

dengan cara mengarahkan kekuatan-kekuatan yang bersifat individu maupun organisasional untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.⁶²

Model ini berorientasi kepada proses (process-oriented). Artinya, proses pendayagunaan kekuatan setiap elemen masyarakat untuk memecahkan problem sosial yang dihadapi dipandang lebih penting ketimbang terpecahkannya masalah.

Peran yang dimainkan oleh praktisi *locality development* adalah sebagai *enabler* (pembangkit kemampuan)⁶³ yang berkuat dengan upaya untuk mengembangkan kapasitas dan integrasi anggota masyarakat agar mampu melakukan upaya membantu diri sendiri (*self-help*), yang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh bagian masyarakat perlu dilibatkan di dalam aktivitas pemecahan masalah sosial yang mereka hadapi secara bersama.⁶⁴

Model ini bersifat *bottom-Up*, artinya perencanaan, pendefinisian masalah, serta pencarian alternatif pemecahannya dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan didampingi oleh para praktisi pengembangan masyarakat. Tugas para praktisi ini sebatas pada pembangunan jaringan, mobilisasi warga masyarakat agar mau ikut terlibat di dalam proses perubahan sosial yang sedang dilakukan untuk masyarakat mereka sendiri.

Di dalam model ini, partisipasi dan kemandirian masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena prinsip dasar yang dibangun adalah bahwa para anggota masyarakat melakukan serangkaian aktifitas pengembangan masyarakat dalam rangka untuk membantu diri sendiri (*self-help*).

⁶² David A. Hardcastles, Patricia R. Powers, dan Stanley Wenocur, *Community Practice*, hlm. 52.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 156.

Social planning

Social planning (Perencanaan Sosial) adalah suatu model pengembangan masyarakat yang mengkaji secara obyektif masa lalu, masa kini dan skenario masa depan, dengan menggunakan data-data yang tersedia atau mengumpulkan data baru, untuk mengkonsolidasikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menangani masalah-masalah sosial secara efisien dan sistematis.⁶⁵

Model ini berorientasi pada tugas/hasil (*task/product-oriented*). Artinya, terpecahkannya masalah dan terjadinya perubahan sosial merupakan tujuan utama yang harus dicapai dengan cara apapun. Dalam hal ini proses untuk mencapai tujuan itu bukan menjadi hal yang penting.

Peran perencana sosial adalah sebagai seorang ahli (*expert*) yang menuntun masyarakat untuk melakukan perubahan sosial⁶⁶ dengan membuat naskah kebijakan (*policy paper*), yang merupakan hasil analisis, evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan penanganan masalah yang telah diambil sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah draft untuk diajukan kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan lainnya.⁶⁷

Model ini bersifat *top-down*, artinya para praktisilah yang melakukan kajian serta analisis terhadap data-data yang ada, atau data baru yang terkumpul melalui penelitian yang mereka lakukan, untuk kemudian disusun sebagai usulan kebijakan. Posisi masyarakat adalah sebagai penerima layanan dan kebijakan demi untuk peningkatan taraf kehidupan sosial mereka. Perencanaan, pendefinisian masalah, serta alternatif pemecahan

⁶⁵ David A. Hardcastles, Patricia R. Powers, dan Stanley Wenocur, *Community Practice*, hlm. 53.

⁶⁶ Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 156.

⁶⁷ David A. Hardcastles, Patricia R. Powers, dan Stanley Wenocur, *Community Practice*, hlm. 53.

masalah disusun oleh para praktisi pengembangan masyarakat atau para perencana sosial. Dengan sifat top-down-nya tersebut, model ini tidak menganggap penting partisipasi masyarakat.

Social action

Social action merupakan model pengembangan masyarakat yang bersifat radikal. Ia berorientasi pada proses dan juga tugas (*both process- and task-oriented*), di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berupaya untuk merubah pola hubungan kekuasaan dan sumberdaya dalam rangka untuk mempengaruhi terjadinya perubahan institusional.⁶⁸ Dalam melakukan aktivitasnya, seorang praktisi aksi sosial mengkonfrontasi hubungan-hubungan kekuasaan hirarkis demi untuk kepentingan kaum lemah di dalam suatu komunitas, yakni anggota masyarakat yang rentan secara sosial, atau anggota masyarakat lainnya yang tidak diperhatikan, apalagi dilibatkan, di dalam proses pengambilan kebijakan.⁶⁹

Orientasi model ini yang mengarah kepada proses maupun tugas/hasil mengimplikasikan bahwa proses pengorganisasian, penyadaran dan pelibatan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah sosial yang dihadapi dipandang sama pentingnya dengan hasil akhir dari serangkaian proses yang dilakukan, yakni terjadinya perubahan sosial yang bersumber dari perubahan pola hubungan struktur di dalam masyarakat.

⁶⁸ Ellen Netting, Peter M. Kettner, dan Steven McMurtry, *Social Work Macro Practice*, hlm. 156.

⁶⁹ David A. Hardcastles, Patricia R. Powers, dan Stanley Wenocur, *Community Practice*, hlm. 53.

C. Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial didefinisikan oleh Lars Hulgard, sebagaimana dikutip oleh Muliadi Paselangi, sebagai

“.....the creation of a social value that is produced in collaboration with people and organization from the civil society who are engaged in social innovations that usually imply an economic activity”.⁷⁰

Sementara Eduardo Morato, sebagaimana dikutip oleh Rachma Fitriati, mendefinisikan wirausaha sosial sebagai “orang atau lembaga inovatif yang memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil bagi mereka yang membutuhkan”.⁷¹

Lebih lanjut Morato menyatakan bahwa Wirausaha sosial berbeda dengan usaha yang lazim atau usaha niaga dengan satu ciri utama, yakni menaruh kepedulian pada upaya membantu kesejahteraan pihak lain alih-alih kesejahteraan diri sendiri.

Pihak yang dibantu oleh Wirausaha sosial ialah golongan yang kurang beruntung atau orang-orang terpinggirkan di kalangan masyarakat.⁷²

Di dalam kewirausahaan sosial, ada 4 elemen dasar,⁷³ meliputi:

- a. Nilai Sosial (*Social Value*).

⁷⁰ Muliadi Paselangi, *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*, terdapat di <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/198/145>. (diakses pada 15 Mei 2015).

⁷¹ Rachma Fitria, *Kewirausahaan Sosial*.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Muliadi Paselangi, *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*.

Elemen khas yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan konvensional adalah adanya nilai sosial yang diperjuangkan, yakni bahwa kewirausahaan sosial dipilih sebagai model bisnis demi untuk menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Masyarakat Sipil (*Civil Society*).

Kewirausahaan sosial membutuhkan keberadaan masyarakat sipil sebagai penopang dalam dua pilar, sebagai inisiator dan sebagai partisipan. Tidak ada kewirausahaan sosial yang berhasil tanpa adanya inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

c. Inovasi (*Innovation*).

Kewirausahaan sosial berusaha memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

d. Kegiatan Ekonomi (*Economic Activity*).

Elemen ini membedakan lembaga kewirausahaan sosial dengan organisasi sosial nirlaba, karena lembaga kewirausahaan sosial menyeimbangkan antara kegiatan sosial sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi merupakan pilar penting bagi sebuah lembaga untuk menjalankan upaya kewirausahaan sosial. Kegiatan bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Berkenaan dengan model usaha, kewirausahaan sosial biasanya dilaksanakan dalam tiga model usaha⁷⁴, yaitu:

a. Leveraged non-profit ventures

Pengusaha mendirikan sebuah organisasi nirlaba untuk mendorong diterapkannya inovasi yang menangani kegagalan pasar atau pemerintah. Dalam melakukan hal tersebut, pengusaha melibatkan berbagai unsur di masyarakat, termasuk organisasi swasta dan publik, untuk mendorong maju inovasi melalui suatu dampak multi-lapis. *Leveraged non-profit ventures* terus menerus bergantung pada dana filantropi dari luar, tetapi keberlanjutan jangka panjang mereka seringkali terjamin mengingat bahwa para mitra memiliki kepentingan atasberlanjutnya usaha tersebut.

b. *Hybrid non-profit ventures*

Pengusaha mendirikan sebuah organisasi non-profit tetapi model ini mencakup suatu kadar pemulihan biaya melalui penjualan barang dan jasa kepada berbagai macam lembaga, publik dan swasta, serta menasar kelompok-kelompok di masyarakat. Seringkali, pengusaha mendirikan beberapa badan hukum untuk mengakomodasi penghasilan pendapatan dan pengeluaran amal dalam struktur yang optimal. Untuk dapat mempertahankan kegiatan transformasi secara penuh dan memenuhi kebutuhan klien, yang seringkali adalah kaum miskin atau terpinggirkan di masyarakat, pengusaha harus memobilisasi sumber-

⁷⁴ <http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur>

sumber dana lain dari sektor masyarakat dan/atau badan amal. Dana tersebut bisa dalam bentuk hibah atau pinjaman, dan bahkan kuasi-aset.

c. *Social business ventures*

Pengusaha membuat sebuah badan usaha untuk laba untuk menyediakan produk atau jasa sosial atau ekologi. Meskipun idealnya keuntungan dihasilkan, namun tujuan utamanya bukan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan bagi pemegang saham, tetapi untuk menumbuhkan usaha sosial dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Akumulasi kekayaan bukanlah prioritas dan keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mendanai perluasan layanan. Pengusaha usaha bisnis sosial mencari investor yang tertarik memadukan antara keuntungan finansial dan keuntungan sosial dari investasi mereka.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

PESANTREN ELBAYAN

A. Aspek Geografis

Pesantren El-Bayan berada di Jl. KM. Syuhud No. 1, Bendasari, Padangsari, Majenang, Cilacap. Transportasi menuju pondok sangat mudah karena tidak jauh dari jalur utama selatan Bandung-Purwokerto.⁷⁵ Sementara jalan masuk dari jalan raya menuju ke lokasi pesantren adalah jalan desa yang sudah beraspal dan cukup lebar, sehingga memudahkan kendaraan apapun untuk mengakses pesantren.

Kondisi geografis pesantren El-Bayan digambarkan di blog pesantren sebagai berikut:

Secara geografis berada di wilayah dataran rendah yang dikelilingi pegunungan. Luas wilayah Desa Padangsari yang mencapai 455 Ha, 322 Ha diantaranya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Jika melihat kondisi wilayah yang seperti itu, maka tidak mengherankan bila sebagian besar jenis mata pencaharian penduduknya adalah petani, sisanya sebagai guru, PNS, tukang dan pedagang. Desa Padangsari mayoritas penduduknya beragama Islam dan terkenal dengan sebutan kantong santri, Kondisi masyarakat yang dapat dikatakan harmonis, aman, tentram dan damai mengakibatkan hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitarnya terjalin baik. Hal ini tercermin dari pengelolaan masjid yang berada di lingkungan pondok oleh penduduk setempat, banyaknya masyarakat yang hadir dalam pengajian umum yang rutin diadakan oleh Pondok pesantren dan banyaknya bantuan baik berupa material maupun imaterial, begitu juga banyak masyarakat sekitar yang mempersilahkan santri untuk mengaji di rumah-rumah penduduk.⁷⁶

⁷⁵ <http://pp-elbayan-majenang.blogspot.co.id/p/profil.html>

⁷⁶ *Ibid.*

B. Sejarah Singkat

Sejarah Pondok Pesantren El-Bayan, sebagaimana digambarkan di blog resmi PP El-Bayan⁷⁷ adalah sebagai berikut:

Pondok Pesantren El-Bayan berdiri diawali dari rasa tanggung jawab terhadap kewajiban menyiarkan agama Islam di seluruh pelosok tanah air. Atas dasar tersebut K.M. Syuhud pada tahun 1930 mendirikan Masjid yang mempunyai fungsi ganda atau double role yakni untuk menjalankan ibadah mahdloh dan digunakan untuk tempat mencari ilmu/mengaji. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat sekitar dan dalam perkembangannya berdirilah Pondok Pesantren Bendasari Majenang (PPBM). Setelah beliau wafat tahun 1954 pengelolaan pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya yaitu K.H. Najmudin yang merupakan alumni pesantren Tebuireng, Jombang.

Seiring dengan laju globalisasi yang demikian pesat yang ditandai dengan derasnya laju informasi dan estafeta pimpinan, pengasuh pondok pesantren merasa perlu untuk lebih mengembangkan kembali kombinasi sistem pendidikan non formal dan formal, maka kemudian dibuat norma untuk mengatur seluruh kegiatan baik meliputi proses belajar mengajar, pengasuh yang kemudian menjadi dewan pengasuh, mengklasifikasikan santri dan peserta didik, hubungan antar masing-masing lembaga yang ada dan masih banyak lainnya yang kemudian diberi nama Norma Yayasan PP. El-Bayan.

Estafeta kepemimpinan pondok pada tahun 2002 dari K.H. Najmudin (wafat Februari 2002) dilanjutkan oleh kedua putranya, yaitu, KH. Imam Subky Najmudin alumni pondok Tebuireng yang notabene pencetus perubahan nama menjadi PP El-Bayan pada tahun 1971 dan K.H. Mahsun Yusuf Najmudin alumni pondok Ploso Kediri.

Sepeninggal K.H. Najmuddin, El-Bayan merubah pola dari kepemimpinan dari kepemimpinan tunggal seorang kyai menjadi kepemimpinan kolektif yang dipegang oleh sebuah badan yang bernama Dewan Pengasuh Pondok Pesantren El-bayan. Mengenai kepemimpinan kolektif ini, blog pesantren ini menyatakan

⁷⁷Ibid.

Sesuai dengan norma yang telah ada bahwa kepemimpinan pondok bersifat kolektif dan tidak ada kepemimpinan tunggal, maka PP. El-Bayan dalam perjalanannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan tersebut salah satunya dipicu oleh beragamnya latar belakang pendidikan, keahlian dan keilmuan para pengasuh, seperti KH. Imam Subky, ..., pendidikan terakhir pesantren Tebuireng Jombang, jabatan dalam pesantren adalah Dewan pengasuh, spesialisasi tasawuf. KH. Mahsun Yusuf Najmudin, pendidikan terakhir pesantren Ploso Kediri, jabatan sebagai dewan pengasuh dan ustadz dan pimpinan Pondok putera, nahwu sorof. KH. Maulan Ibrahim, pendidikan PP. El-Bayan Majenang, jabatan sebagai dewan pengasuh dan ustadz, spesialisasi tafsir

Kemudian Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM., pendidikan terakhir S2, pendidikan non formal di PP Kerapyak Yogyakarta dan jabatan sebagai dewan pengasuh dan Pimpinan Yayasan Pendidikan Agama Islam (YPAI) PP. El-Bayan, juga sebagai dosen di IAIN Purwokerto, spesialisasi fiqih. Drs. KH. Muhammad Marda al hafidz, pendidikan terakhir S 1 UNS, pendidikan nonformal di PP Al Qurani Solo, beliau adalah ustadz spesialis tahfidzul quran. KH. Abdusyaku, ahli fiqh, K. Muhlas Adnan ahli tafsir, KH. Muhamid Sofari, ahli hisab, K. Sonhaji ahli Ushul, K. Kholiludin Nahwu. K.M. Irfangi ahli sorof dan masih ada yang lain.⁷⁸

Sementara itu, visi yang dibangun di pesantren ini adalah “membentuk manusia yang bertaqwa dan berakhlaqul karimah dengan misi membantu masyarakat dalam mewujudkan generasi Islam yang berhaluan ahlisunnah wal jamaah yang terampil dan mandiri”.⁷⁹

IAIN PURWOKERTO

C. Program Pendidikan dan Dakwah

1. Pendidikan

Meskipun fokus penelitian ini adalah pada pondok pesantren El-Bayan, akan tetapi kiranya perlu disebutkan juga berbagai jenis pendidikan

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid.

yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren El-Bayan. Terkait dengan berbagai jenis pendidikan, pesantren El-Bayan membedakan anggota masyarakat yang belajar di pesantren ini ke dalam dua jenis, yaitu santri dan peserta didik. Mengenai perbedaan antara keduanya, berikut kutipan dari blog resmi pondok pesantren ini.

Yayasan PP El-Bayan mengklasifikasikan masyarakat pesantren kedalam dua kriteria, pertama santri, yaitu mereka yang melakukan kegiatan di pondok/madrasah dan menginap, sedangkan peserta didik yaitu mereka yang melakukan kegiatan pondok/madrasah dan menginap di luar lingkungan pesantren. Jumlah santri dan peserta didik secara keseluruhan adalah 1776, dengan rincian, 570 santri dan sisanya adalah pesera didik.

Sebagian besar santri yang ada adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Santri-santri tersebut tidak hanya berasal dari daerah Kabupaten Cilacap saja tetapi banyak juga yang berasal dari luar Kabupaten bahkan dari luar Pulau Jawa, seperti : Ciamis, Banyumas, Kebumen, Madiun, Banyuwangi, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan, Aceh. Sedangkan kiprah alumni masih pada tataran propinsi baik dalam bidang agama, politik, budaya ekonomi maupun sosial.⁸⁰

a. Pendidikan Formal

Kegiatan pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang adalah sebagai berikut:

- 1) **Taman Kanak-kanak**, berdiri tahun 1988, Kepala Sekolah, Diniyatul ‘Aliyah, dengan jumlah siswa 58 orang.
- 2) **Madrasah Ibtidaiyah**, berdiri tahun 1946, Kepala Sekolah Maknun Efendi, A.Ma., dengan jumlah siswa 352 orang. Kurikulum yang

⁸⁰*Ibid.*

digunakan mengacu pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional

- 3) **Madrasah Tsanawiyah**, berdiri tahun 1987, Kepala Sekolah Hj. Farida Subky, S.S., dengan jumlah siswa 763 orang. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional
- 4) **Madrasah Aliyah**, berdiri tahun 1989, Kepala Sekolah Hj. Faiqoh Subky, S.H., dengan jumlah siswa 266 orang. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dan membuka 2 program studi pilihan, yaitu IPA dan IPS. Diantara Prestasi yang diraih pada tahun 2005 adalah 3 buah Trophy Bupati Cilacap dalam Lomba Bahasa Inggris, Juara I untuk kategori Speech Contest dan Story Telling, Juara 2 untuk ketegori News Reading
- 5) **SMK Komputama**, berdiri tahun 2005, Kepala Sekolah H. Firdaus Subky, S.E.. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kementerian Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan membuka Program Keahlian, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik RPM dan Pemasaran. Program pendidikan yang menjadi fokus selain keahlian komputer adalah kemampuan bahasa yaitu bahasa Inggris di kelas satu dan Bahasa Arab di kelas dua, dan setiap hari mereka diwajibkan untuk menghafal lima kosa kata di pagi hari dan membuat satu kalimat disiang hari. Sedangkan prestasi yang pernah diraih adalah juara satu story telling, MTQ, Tilawah putri tingkat kabupaten. ⁸¹

⁸¹*Ibid.*

b. Pendidikan Non Formal

Selain pendidikan formal, PP. El-Bayan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal diantaranya:

- 1) **Taman Pendidikan al Quran**, berdiri tahun 1985, Kepala Sekolah Diniyatul 'Aliyah, dengan jumlah siswa 94.
- 2) **Madrasah Diniyah**, yang meliputi *a. Awaliyah dan Wustha*, dengan Kepala Madrasah adalah KH. Mahsun Yusuf Najmuddin, dengan jumlah siswa 397. *b. Ulya*, dengan Kepala Madrasah adalah Ky. Mukhlas Adnan dengan jumlah siswa 114. Madrasah Diniyah (Awaliyah, Wustha dan Ulya) tersebut berdiri tahun 1989, sebelumnya telah didirikan pada tahun 1958 bernama Madrasah Miftahul Huda (MMH), kemudian pada tahun 1976 dirubah menjadi SP (Sekolah Persiapan), MTs. Dan MA Kurikulum Lokal. Materi kajian Madrasah Diniyah antara lain: Fiqih, Tauhid, Al-Qur'an, Tafsir, Hadits, Akhlaq, dan Bahasa Arab. Kitab kajian yang digunakan antara lain:

Madin Awaliyah : *al-Arba'in al-Nawawi, Ahlaq al-Baniin, al-Amtsilat al-Tashriifiyah, Tuhfatu al-Athfal, al-Sabrowi al-Safi'i, Lughat al-Tahatab al-Mushawirat, dan Hulashah Nur al-Yaqiin*. Madin Wustho : *Tafsir Jalalain, Fath al-Qarib al-Mujib, Risalat al-Haid, Lathaif al-Isarah, al-Jawahir al-Kalamiyah, Matn al-Bajuri al-Sanusiyah, al-Hariidat al-Bahiyah, Muhtar al-Ahadits al-Nabawiyah, 'Ilmu al-'Arud, al-Muhtashar al-Safi'ii al-Duruus al-Tarih al-Islamy, Qowa'id al-I'rob, Matn al-Jazariyah, Ta'lim al-Muta'alim, 'Idzdzat al-Naasiin, Taqriir al-Jurumiyah, Nadzm al-'Imrithy, Alfiyah ibn Malik, , al-Kailany litashriif al-'Izy, Nadzm al-Maqsud, Qowa'id al-I'lal, , Lughat al-Tahatab al-Mushawirat, dan. Madin 'Ulya : Tafsir Jalalain, Taqrib, al-Maqsud, Iidhoh al-Mubaim, al-Tajriid al-Shariih,*

al-Luma', 'imdat al-Salik, al-Tasrii' al-Islamy, Musthalah al-Hadits, 'Idhat al-Fardi, Minhat al-Mughis, Hasyat al-Dasuki, Sarh al-Jawahir al-Maknun, 'Ilmu Tafsir, Hafni 'Ala Iisa Ghazy, Lathaif al-Isyaroh, Faraid al-Bahiyah, al-Risalat al-Uula, Sarh ibn 'Aqil, dan 'Uqud al-Juman.

- 3) **Tahfidzul Qur'an**, yang mencetak santri hafal Al-Quran 30 juz dengan Pengasuh Drs. Muhammad. Lokasi untuk mereka yang hendak menghafalkan al Qur'an dikhususkan setelah mereka khatam Qur'an diwajibkan untuk melancarkan hafalannya selama dua tahun.⁸²

c. Pendidikan Usaha dan Keterampilan

Untuk membekali santri apabila kembali kedaerahnya/mukim, diselenggarakan pendidikan keterampilan komputer, peternakan, pertukangan, pertanian, perdagangan dan keterampilan jasa disesuaikan dengan potensi masing-masing.

Pendidikan dibidang Usaha dan Keterampilan pengelolaannya semua diserahkan kepada Santri dibawah bimbingan santri-santri senior, diantara Jenis Usaha dan Keterampilan itu adalah ,1). Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) berdiri tahun 1977, 2). El-Bayan Tailor (Keterampilan Menjahit) berdiri tahun 1978, 3). Perbengkelan (Bengkel Sepeda) berdiri tahun 1979, 4) Pertanian, Keterampilan bertani dengan menggarap tanah waqaf, 5). Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika (IKMI) berdiri tahun 1998, dengan membuka Program Intensif dan Program Profesi Satu Tahun. Program Intensif membuka program : Intensif 4 Bulan, Privat, dan Bahasa Inggris. Program Profesi Satu Tahun membuka jurusan Manajemen Informatika dan Manajemen Keuangan 6) Warung

⁸²*Ibid.*

Telekomunikasi (Wartel) berdiri tahun 1999. 7) Perikanan dan peternakan

83

2. Dakwah Kemasyarakatan/Pengembangan Masyarakat

PP. El-Bayan bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial /kemasyarakatan, yaitu yang kegiatannya melibatkan masyarakat sekitar.

Pertama, bidang mental agama antara lain:

- a. **Ittihadul Muballighin Al Islami (IMA)**, yang bergerak dibidang tabligh dalam bentuk pembelajaran berdakwah untuk santri didalam pondok maupun di luar pondok.
- b. **Jami'atul Qurra Wal Hufffadz "Al Imdad"**, yang bergerak dibidang tahfidz Al Quran yang melaksanakan simakan rutinan di jam'iah-jam'iah masyarakat sekitar.
- c. **Pengajian Reboan**, yaitu pengajian yang diikuti masyarakat (kaum sepuh) sekitar pondok, yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu.
- d. **Pengajian Muslimat**, pengajian yang diikuti ibu-ibu muslimat sekitar pondok yang dilaksanakan setiap hari Ahad Kliwon.

Kedua, bidang kesehatan, berupa Balai Pengobatan PP. El-Bayan yang didirikan tahun 2001.

⁸³*Ibid.*

Ketiga, bidang kesejahteraan masyarakat, yang dihimpun dalam suatu wadah bernama KOBER (Komunitas Masyarakat Bergerak), yang anggotanya terdiri atas Abang-abang Becak se majenang.⁸⁴



⁸⁴*Ibid.*

BAB IV

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI PESANTREN ELBAYAN

A. Kewirausahaan Sosial Pesantren El-Bayan

Kewirausahaan sosial yang sekarang ini dijalankan oleh para santri pesantren El-Bayan bisa dikatakan berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Kewirausahaan sosial bukanlah sebuah model bisnis yang secara sengaja dipilih oleh pengelola pesantren ini sebagai jalan untuk *fund raising* atau untuk mencapai misi sosial yang dipikunya. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kewirausahaan sosial di pesantren ini, hingga penelitian ini dilakukan, belum disadari sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengasuh dan santri.

Kewirausahaan di pesantren El-Bayan berawal dari pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada santri sebagai tambahan untuk pendidikan ilmu-ilmu keagamaan.⁸⁵ Dalam satu wawancara, K.H. Dr. Fathul Amin Aziz, salah satu anggota dewan pengasuh mengatakan bahwa alumni pesantren di Indonesia dipandang sebelah mata oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki standar kompetensi untuk menduduki jabatan atau pekerjaan formal selepas lulus dari pesantren. Maka dari itu, pesantren berkewajiban mempersiapkan para santrinya agar saat lulus dari pesantren nantinya, mereka siap untuk secara mandiri menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain.⁸⁶

⁸⁵Hingga sekarang pun, kesan yang didapat oleh peneliti dari wawancara dengan pengasuh pesantren ini adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang bisa disebut sebagai kewirausahaan sosial itupun masih dianggap oleh mereka sebagai kegiatan pendidikan kewirausahaan.

⁸⁶Wawancara dengan KH. Dr. Fathul Amin Aziz, 8 September 2015.

Selain tercermin dari pernyataan salah satu pengasuh sebagaimana di atas, arti penting kewirausahaan (sosial) bagi para pihak di pesantren ini tercermin dari struktur kepengurusan pesantren. Tidak sebagaimana lazimnya struktur kepengurusan di pesantren-pesantren pada umumnya – yang biasanya berisi pengurus harian, seksi pendidikan, ibadah dan keamanan – struktur kepengurusan di pesantren ini, selain struktur lazim di atas, ditambah dengan beberapa departemen lain yang masing-masing mengurus satu bidang usaha tertentu.

Adapun kewirausahaan yang dikembangkan di pesantren El-Bayan adalah:

1. Mini Market

Mini market (atau disebut di struktur kepengurusan sebagai Koperasi) adalah bidang usaha yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Terletak di luar pondok, tetapi persis di sebelahnya, dan di tepi jalan umum, mini market ini bisa diakses dan melayani siapa saja, termasuk para santri sendiri dan masyarakat umum di sekitar pesantren atau orang yang melewati jalan di depan mini market tersebut.

2. Bengkel Motor

Bengkel motor terletak di seberang mini market. Fungsi utama bengkel ini adalah untuk memberikan pelatihan ketrampilan perbengkelan motor kepada para santri. Selain itu, bengkel ini dibuka setiap hari dengan menggunakan tenaga profesional (bukan santri) untuk melayani masyarakat yang hendak memperbaiki sepeda motornya. Adapun pengelolaannya dipegang oleh departemen Perbengkelan dan Elektro dalam kepengurusan pesantren El-Bayan.

3. Menjahit

Unit usaha Menjahit berada tepat di sebelah bengkel motor. Sebagaimana halnya bengkel motor, unit usaha ini dibuka untuk memberikan pelatihan keterampilan menjahit bagi santri, namun juga dibuka untuk umum. Adapun pengelolaannya berada di bawah departemen Pelatihan Jahit.

4. Klinik Kesehatan

Unit usaha Klinik Kesehatan, yang disebut dengan nama Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) atau Balai Pengobatan El-Bayan, berada di bawah departemen Kesehatan dan Kebersihan. Klinik ini didirikan sebagai tempat berobat bagi santri dan juga masyarakat di sekitar pesantren. Klinik ini memiliki sebuah mobil ambulans yang digunakan untuk menjemput atau mengangkut pasien.

5. Dapur Umum (Pengelolaan Kos Makan Santri).

Pengelolaan Kos Makan Santri, yang disebut dengan nama Dapur Umum (disingkat DPU) adalah unit usaha yang didirikan untuk mengelola kebutuhan makan santri sehari-hari. Di Dapur Umum ini Departemen DPU (Dapur Umum) mengelola penyediaan makan untuk santri, mulai dari pemilihan menu, berbelanja bahan, memasak hingga menyajikan dan juga menyediakan tempat untuk makan.

Penyediaan makan di Dapur Umum ini tidak gratis. Santri harus membayar iuran makan untuk bisa makan di unit ini, yang menurut pengamatan peneliti bersifat wajib. Artinya, santri wajib makan di Dapur Umum ini. Tetapi, tidak semua santri harus membayar penuh. Menurut keterangan dari ketua pengurus Pondok, sebagian santri yang kurang mampu bisa membayar sebagian, atau bahkan sama sekali tidak membayar, tetapi tetap bisa mendapatkan hak makan yang sama dengan santri yang membayar penuh. Biaya untuk penyediaan makanan bagi santri yang membayar sebagian atau yang tidak membayar

sama sekali ini diambilkan dari keuntungan atau kelebihan dana pengelolaan dapur umum.⁸⁷

Gambar 1 Foto-foto Unit Usaha Pesantren El-Bayan



Bengkel



Mini Market



Menjahit



Dapur Umum



Ambulans



Balai Pengobatan

⁸⁷Wawancara dengan ketua pondok, Ajid Anwarudin, 9 September 2015.

Kegiatan usaha bisa dikategorikan ke dalam jenis kewirausahaan sosial bila memiliki empat unsur, yaitu 1) misi sosial, 2) masyarakat sipil, 3) inovasi, dan 4) kegiatan ekonomi. Keempat unsur ini digunakan untuk mengukur apakah kegiatan usaha yang dilaksanakan di Pesantren El-Bayan bisa dikatakan sebagai sebuah kewirausahaan sosial atau tidak.

1. Misi Sosial

Sebagaimana telah di bahas di bab I di atas, misi sosial bagi dunia pesantren merupakan *core business*. Misi sosial tersebut adalah pendidikan (internal) dan dakwah kemasyarakatan/Pengembangan Masyarakat (eksternal).

Dalam konteks kewirausahaan sosial ini, misi sosial dipandang terwujud bila kewirausahaan sosial yang dipilih sebagai model bisnis bisa menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasar pandangan di atas, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh pesantren bisa disebut sebagai sebuah kewirausahaan sosial bila kegiatan tersebut membawa manfaat nyata bagi dua misi utama pesantren, yang berupa, misalnya, tercukupinya pendanaan biaya operasional pesantren untuk melaksanakan pendidikan dan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat sekitar.

2. Masyarakat Sipil

Satu ciri penting lain dari kewirausahaan sosial adalah masyarakat sipil sebagai inisiator dan partisipan. Artinya, kegiatan usaha dalam kewirausahaan sosial ini lahir dari masyarakat dan berjalan secara

berkesinambungan dengan partisipasi dari masyarakat. Inisiasi dan partisipasi berkesinambungan ini terwujud dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konteks kewirausahaan sosial di pesantren El-Bayan, kelahiran kegiatan kewirausahaan sosial ini, meskipun atas dorongan dari pengasuh, tetapi inisiatornya adalah para santri yang memiliki kesadaran bahwa bekal keterampilan berwirausaha akan memberi manfaat besar bagi kehidupan dan penghidupan mereka di masa yang akan datang.

Begitu juga, keberlanjutan kegiatan kewirausahaan ini utamanya ditopang oleh para santri sendiri. Ini bisa dilihat dari struktur kepengurusan di pesantren El-Bayan⁸⁸ dan juga berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

3. Inovasi

Satu unsur penting lain lagi dalam kewirausahaan sosial adalah adanya inovasi. Kewirausahaan sosial berusaha memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

Kewirausahaan sosial yang dijalankan di Pesantren El-Bayan itu sendiri bisa disebut sebagai sebuah inovasi, di mana “masyarakat sipil” di dalam pesantren mencetuskan berbagai gagasan pemecahan masalah

⁸⁸Satu hal menarik dari struktur kepengurusan santri El-Bayan adalah adanya divisi untuk masing-masing bidang usaha yang dijalankan oleh pesantren. Setiap divisi usaha berada di bawah tanggung jawab seorang koordinator/penanggung-jawab divisi.

pembiayaan yang mereka hadapi dengan membangun kegiatan-kegiatan yang menghasilkan laba, alih-alih hanya mengandalkan sumbangan dari donatur, sebuah cara *fundraising* yang paling mudah dan paling lazim dilakukan di dunia pesantren.

4. Kegiatan Ekonomi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa unsur kegiatan ekonomi inilah yang membedakan lembaga kewirausahaan sosial dengan organisasi sosial nirlaba. Lembaga kewirausahaan sosial menyeimbangkan antara kegiatan sosial sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi merupakan pilar penting bagi sebuah lembaga untuk menjalankan upaya kewirausahaan sosial. Kegiatan bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Dari paparan terlihat bahwa pesantren El-Bayan memiliki serangkaian kegiatan ekonomi yang menghasilkan laba, yaitu mini market, bengkel, kursus menjahit, klinik kesehatan dan dapur umum/“kos makan”.

Adapun model usaha yang dijalankan adalah model *social business ventures* (usaha bisnis sosial). Ada beberapa ciri yang bisa dijadikan sebagai ukuran, yaitu

1. Pesantren El-Bayan membangun beberapa unit usaha untuk laba (*for-profit*)
2. Sekalipun jenis usahanya adalah *for-profit*, namun tujuan utamanya bukan untuk memaksimalkan pengembalian finansial bagi pemegang saham, tetapi untuk menumbuhkan usaha sosial dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Contoh paling jelas terlihat pada kos makan dan klinik kesehatan (lihat deskripsi tentang unit-unit usaha di atas).

3. Akumulasi kekayaan bukanlah prioritas. Para investor dalam unit-unit usaha pesantren El-Bayan bukanlah pengejar keuntungan belaka, tetapi tertarik memadukan antara keuntungan finansial dan keuntungan sosial dari investasi mereka.
4. Keuntungan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mendanai perluasan layanan. Ciri ke empat ini terlihat pada bagaimana hasil dari berbagai unit tersebut digunakan kembali untuk mendanai kebutuhan biaya utilitas (air dan listrik) dan biaya pengelolaan pesantren yang dikelola oleh para santri sendiri, yang dengan demikian, kemudian memberikan kemungkinan bagi Yayasan Pondok Pesantren untuk mengalokasikan dana yang seharusnya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi beasiswa bagi peserta didik tidak mampu dan anak-anak yatim piatu.

B. Dampak Kewirausahaan Bagi Pelaksanaan misi sosial Pesantren El-Bayan

Karena pesantren memiliki misi sosial ganda, yaitu pendidikan (internas) dan dakwah kemasyarakatan/pengembangan masyarakat (eksternal), maka dampak kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh pesantren El-Bayan juga dilihat dalam dua ranah tersebut.

1. Dampak Internal (Pendidikan)

Tercukupinya kebutuhan pembiayaan untuk utilitas (listrik dan air) serta biaya operasional pondok (tidak termasuk lembaga pendidikan

formal) merupakan dampak langsung yang dirasakan dari kegiatan kewirausahaan sosial yang dijalankan di pesantren El-Bayan.⁸⁹

Tercukupinya biaya operasional pondok secara mandiri oleh santri melalui kegiatan kewirausahaan sosial ini kemudian memungkinkan timbulnya dampak tidak langsung, yaitu pemberian bea siswa oleh pengasuh pesantren kepada para santri dan peserta didik yang kurang mampu di lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan yayasan pesantren El-Bayan.⁹⁰

2. Dampak Eksternal (Dakwah Kemasyarakatan)

Sebagaimana halnya yang terjadi pada dampak secara internal, dampak secara eksternal dari kegiatan kewirausahaan sosial pesantren El-Bayan ini juga memiliki dua level, yaitu langsung dan tidak langsung.

Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kewirausahaan sosial untuk masyarakat di luar pesantren, misalnya pengobatan murah oleh klinik pengobatan milik pesantren, pemberian santunan oleh pihak pesantren melalui pengasuh kepada anak-anak yatim piatu, serta pengorganisasian tukang becak di Majenang melalui organisasi KOBER (Komunitas Masyarakat Bergerak).

⁸⁹Peneliti tidak memiliki data tertulis mengenai hal ini. Keterangan mengenai hal ini peneliti dapatkan dari Bpk. Dr. H. Fathul Amin Aziz dalam wawancara pada tanggal 10 September 2015.

⁹⁰Peneliti menyebutnya sebagai dampak tidak langsung karena kewirausahaan sosial dilaksanakan di pondok pesantren El-Bayan, sementara lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan pesantren adalah pihak lain yang memiliki kaitan dengan pondok pesantren tersebut.

Sementara dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan kewirausahaan sosial pesantren El-Bayan ini adalah berupa keterampilan kewirausahaan yang dimiliki oleh para alumninya, yang membuat mereka mampu berkembang menjadi wirausahawan handal yang, selain bermanfaat pada diri mereka sendiri, juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar tempat mereka berkiprah selepas menyelesaikan pendidikan di pesantren El-Bayan.

C. Dasar Pemikiran (Keagamaan) Kewirausahaan Sosial Pesantren Elbayan

Sebagaimana di katakan di atas, kewirausahaan sosial yang dilaksanakan di Pesantren ini bisa dikatakan merupakan buah dari sebuah ketidaksengajaan. Pada awalnya, rintisan kewirausahaan yang dilaksanakan di Pesantren ini berawal dari Pendidikan Kewirausahaan yang diberikan oleh pengasuh pesantren kepada santri-santrinya.

Dasar pemikiran pemberian pendidikan kewirausahaan terhadap santri, selain pendidikan ilmu-ilmu keagamaan, adalah keprihatinan pengasuh terhadap masa depan santri dalam hal ekonomi.

Menurut Pengasuh Pesantren, santri pesantren salaf masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Mereka dipandang tidak memiliki standar kompetensi untuk menduduki jabatan atau pekerjaan formal selepas lulus dari pesantren. Maka dari itu, memberikan bekal keterampilan kepada para santri agar mereka mampu mandiri menemukan jalan penghidupan selepas menyelesaikan pendidikan di pesantren merupakan sebuah kewajiban bagi pengelola pesantren.⁹¹

⁹¹Wawancara dengan KH. Dr. Fathul Amin Aziz, 8 September 2015.

Pemberian bekal keterampilan ini juga didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi “*khairu al-nas ‘anfa’uhum li al-nas*” atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.⁹²

Pemberian bekal keterampilan, yang kemudian secara tidak disadari menjadi sebuah kewirausahaan sosial tersebut, akan mencetak manusia-manusia yang bukan hanya tidak bergantung kepada manusia lain, tetapi manusia yang siap sedia untuk menjalani kehidupan di masyarakat, yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, kapanpun dibutuhkan.

Di tempat masing-masing, para alumni ini juga menciptakan lembaga-lembaga baru yang melaksanakan pola yang sama, sehingga upaya kewirausahaan sosial di pesantren El-Bayan ini kemudian akan semakin besar dan semakin luas dengan tumbuhnya upaya-upaya baru di berbagai tempat.



IAIN PURWOKERTO

⁹²*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

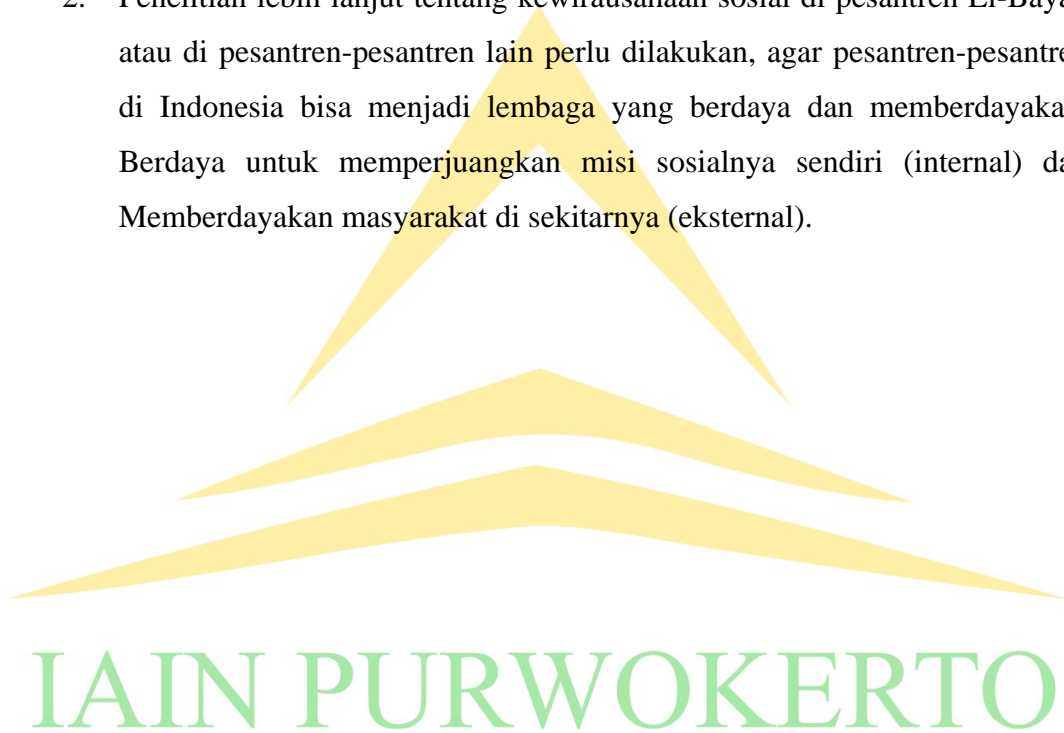
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewirausahaan Sosial yang dibangun di pesantren El-Bayan merupakan kelanjutan secara tidak disengaja dari pemberian bekal kewirausahaan untuk para santri yang dilakukan oleh pesantren El-Bayan.
2. Pesantren El-Bayan memiliki berbagai unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai Kewirausahaan Sosial karena memenuhi empat unsur kewirausahaan sosial, yaitu Misi Sosial, Masyarakat Sipil (sebagai inisiator dan partisipan), inovasi dan kegiatan ekonomi.
3. Model usaha yang dianut termasuk dalam kategori *Social Business Ventures*, di mana Pesantren El-Bayan membangun unit-unit usaha untuk mendapatkan laba, dengan menggunakan dana investor yang tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi lebih demi untuk berjalannya berbagai misi sosial yang dimiliki oleh pesantren El-Bayan.
4. Kegiatan kewirausahaan sosial ini memberikan dampak sosial, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada masyarakat pesantren sendiri (internal) maupun kepada masyarakat di luar pesantren (eksternal).
5. Kewirausahaan sosial (atau pelatihan kewirausahaan) ini diberikan karena keprihatinan pengelola pesantren atas tidak diakuinya kompetensi lulusan pesantren untuk memangku pekerjaan atau jabatan. Selain itu, sebuah hadits yang mengatakan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain” menjadi pendorong.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

1. Perlu dilaksanakan sebuah kegiatan untuk berbagi pengetahuan tentang kewirausahaan sosial bagi pesantren, sehingga kegiatan kewirausahaan sosial bisa menjadi tren dalam pengelolaan pesantren, sehingga pesantren bisa memangku misi sosialnya secara lebih baik.
2. Penelitian lebih lanjut tentang kewirausahaan sosial di pesantren El-Bayan atau di pesantren-pesantren lain perlu dilakukan, agar pesantren-pesantren di Indonesia bisa menjadi lembaga yang berdaya dan memberdayakan. Berdaya untuk memperjuangkan misi sosialnya sendiri (internal) dan Memberdayakan masyarakat di sekitarnya (eksternal).



Bibliografi

- Ahmady, Noor. 2013. *Pesantren Dan Kewirausahaan (Peran Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mencetak Wirausaha Muda Mandiri): Executive Summary*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Alaena, Badrun. 2000. *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta: Erlangga.
- Basyuni, Ison. 1985. "Da'wah Bil Hal Gaya Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Brueggemann, William G. 2002. *The Practice of Macro Social Work*, 2nd ed., California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Churiyah, Madziatul 2014. *Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Sosial Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Tradisional (salafiyah)* (Malang: Universitas negeri Malang, 2014), terdapat di <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/37447> (diakses pada 15 Mei 2015)
- Creswell, John W. 2010. *Reasearch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideology LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feillard, Andrée. 1999. *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Fitria, Rachma.tt. *Kewirausahaan Sosial*, terdapat di <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/rachma.fitriati/material/presentasisocialentrepreneurshiprachmafisipui.pdf>, (Diakses pada 15 Mei 2015)

- Hardcastles, David A., Powers, Patricia R. dan Wenocur, Stanley. 1996. *Community Practice: Theories and Skills for Social Workers*, 2nd ed., New York: Oxford University Press.
- Hasyim, Yusuf. 1988. "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan" dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (ed.). *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar Internasional "the Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Henderson, Paul. 2000. "Community Work" dalam Martin Davies dan Rose Barton (ed.), *The Blackwell Encyclopaedia of Social Work*, Oxford: Blackwell Publishers.
- <http://pp-elbayan-majenang.blogspot.co.id/p/profil.html>
- <http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur>
- Ibrahim bin Ismail, *Syarh al-Ta'lim al-Muta'allim*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuh, tt).
- Mahfudh, M. Sahal. 1992. "Kata Pengantar", dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga.
- Mahfudh, M. Sahal. 1994. *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga.
- Marlow, C. 2001. *Research Methods for Generalist Practice*. (3rd ed), Toronto: Brooks/Cole.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana.
- Mudatsir, Arief. (1985). Kajian Desa Pesantren. Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Nakamura, Mitsuo. 1997. "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS.

- Netting, Ellen, Kettner, Peter M. dan Steven McMurtry, 2004. *Social Work*, 3rd ed., Boston: Pearson.
- Paselangi, Muliadi. tt. *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*, terdapat di <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/198/145>. (diakses pada 15 Mei 2015).
- Rohmah, Lailatu. tt. *Manajemen Kewirausahaan Pesantren*, terdapat di <http://lailaturohmah.blogspot.com/2011/02/manajemen-kewirausahaan-pesantren.html> (diakses pada 15 Mei 2015).
- Salim, Hairus dan Amin, Nuruddin. 1994. "Ijtihad dalam Tindakan" kata pengantar editor dalam M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kaesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. "Prospek Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar Internasional "The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Zastrow, Charles H. 2002. *The Practice of Social Work*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 2002.

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO